

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
TAHUN 2023

Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan
Perikanan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban pelaksanaan amanah

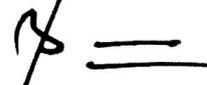
yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan LKj Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Ditjen PDSPKP.



Jakarta, 28 April 2023
Direktur Jenderal PDSPKP


Budi Sulistiyo

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Budi Sulistiyo

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Achmad Hidayat

Tiara Pratiwi

Darmawangsa

Yayuk Sukarsih

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ade Juli Hafлах Mulia

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Berdasarkan PK tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen PDSPKP.

Dari 24 indikator kinerja tersebut, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja telah mencapai target Triwulan I Tahun 2023 dan 2 (dua) indikator kinerja belum melampaui target Triwulan I Tahun 2023 yang ditetapkan. Dengan kondisi capaian ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku mencapai 95,26%.

Pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dari 24 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 17 indikator kinerja bersifat tahunan, 2 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 5 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 17 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, (2) Konsumsi Ikan (setara utuh segar), (3) Kinerja Logistik Hasil Perikanan, (4) Nilai PNBPK Ditjen PDSPKP, (5) Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP, (6) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), (7) Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP, (8) Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP, (9) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP, (10) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP, (11) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP, (12) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, (13) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP, (14) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (15) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (16) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP, serta (17) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.

3. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 5 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Nilai Ekspor Hasil Perikanan, (2) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan, (3) Pembiayaan Usaha KP melalui Kredit Program, (4) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP, dan (5) Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
5. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target Triwulan I Tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu nilai ekspor hasil perikanan dengan persentase capaian 87,18% terhadap target Triwulan I Tahun 2023 dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program dengan persentase capaian 50,52% terhadap target Triwulan I Tahun 2023.

Pada Triwulan I Tahun 2023, anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp388.500.000.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat Auto Adjustment (AA) sebesar Rp80.943.119.000,- sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp307.556.881.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar Rp32.659.831.524,-. Realisasi anggaran ini setara dengan 8,41% terhadap total pagu anggaran awal atau 10,62% pagu anggaran pasca AA.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaman Sumber Daya Manusia.....	5
E. Permasalahan Utama.....	6
F. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja.....	17
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.....	20
1. Volume produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
Sasaran Program 2. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan.....	23
2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan.....	23
Sasaran Program 3. Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	31
3. Konsumsi Ikan	31
Sasaran Program 4. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan.....	34
4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan.....	34
5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan	38
6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	41
7. Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	45
8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	47
Sasaran 5. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat	48
9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	48
Sasaran 6. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	52
10. Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP.....	52
11. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP.....	55
12. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP.....	58
13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	59
14. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	64

15.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	67
16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	68
17.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	70
18.	Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	74
19.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	75
20.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	76
21.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP	77
22.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP	79
23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP	80
24.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	84
C.	Realisasi Anggaran	87
BAB IV PENUTUP		89
A.	Kesimpulan	89
B.	Permasalahan dan Rekomendasi	90
C.	Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022	92
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GAMBAR		ix
DAFTAR LAMPIRAN		xi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023.....	15
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2023	18
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan	23
Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan I Tahun 2023.....	24
Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan I Tahun 2023	25
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan	31
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	35
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan	39
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	42
Tabel 11. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2023	42
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	46
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	48
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP).....	50
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP.....	53
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP	55
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	58
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	59
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	64
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	67
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	68
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP.....	71
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	74
Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	76
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP.....	77

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP	78
Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP	79
Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP.....	81
Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.....	84
Tabel 30. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan I Tahun 2023	87
Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2023	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP	5
Gambar 3. Keragaman SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2023	5
Gambar 4. NKO Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023.....	17
Gambar 5. Sosialisasi Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB kepada Enumerator.....	21
Gambar 6. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk KP Tahun 2023	22
Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	22
Gambar 8. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Triwulan I Tahun 2023	24
Gambar 9. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan I Tahun 2023	26
Gambar 10. Partisipasi KKP dalam <i>Seafood Expo North America</i> (SENA) di Boston, Amerika Serikat pada Tanggal 12-14 Maret 2023	30
Gambar 11. Partisipasi KKP dalam Indonesian Hajj Expo 2023 yang Diselenggarakan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.....	30
Gambar 12. Safari Gemarikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku pada Tanggal 20 Maret 2023	33
Gambar 13. Safari Gemarikan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 6 Maret 2023.....	33
Gambar 14. Promosi/Kampanye melalui Media Sosial Gemarikan Tahun 2023.....	33
Gambar 15. Persiapan Pelaksanaan Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Kota Palu	34
Gambar 16. Angka Perkiraan Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan I Tahun 2022-2023 (Rp Triliun)	36
Gambar 17. Identifikasi dan Koordinasi Lokus Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Kebumen	37
Gambar 18. Pemetaan Peluang Investasi Usaha KP di Wilayah Kabupaten Banyuwangi.....	37
Gambar 19. Promosi Peluang Investasi Usaha KP di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Waropen	38
Gambar 20. Pembahasan pengembangan Indeks Kinerja Logistik Ikan pada moda transportasi Darat dan Udara, Jakarta 27 Maret 2023	40
Gambar 21. Pembahasan pengembangan Indeks Kinerja Logistik Ikan pada moda transportasi Darat dan Udara, Bogor 16 Februari 2023.....	41
Gambar 22. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2023	42
Gambar 23. Kegiatan Identifikasi Lokasi dan Debitur Potensial Fasilitas Akses Pembiayaan.....	45
Gambar 24. Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan ..	45
Gambar 25. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP	49
Gambar 26. Koordinasi Pembentukan Tim NTPHP Tahun 2023.....	51

Gambar 27. Penyusunan Buku Listing dan Kuisisioner NTPHP	51
Gambar 28. Pengembangan Aplikasi NTPHP.....	51
Gambar 29. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP	54
Gambar 30. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	54
Gambar 31. Pengumpulan Dokumen WBK Direktorat PBM Tahun 2022 pada tanggal 9 Februari 2023	57
Gambar 32. Pertemuan antara Direktorat PBM dan Itjen KKP pada Tanggal 10 Februari 2023	57
Gambar 33. Review Pelaksanaan Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Direktorat PBM oleh Inspektorat V	57
Gambar 34. Kegiatan persiapan dan penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada BBP3KP oleh Inspektorat IV	58
Gambar 35. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur	62
Gambar 36. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin Kinerja Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2022	62
Gambar 37. Pembahasan Bahan Ajar Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional APHP dan PM HKP dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP	62
Gambar 38. Kegiatan dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP	63
Gambar 39. Kegiatan Uji Kompetensi JF PM HKP dalam rangka Pengembangan JF binaan PDSPKP	63
Gambar 40. Pelantikan JF dan Sumpah Pegawai APK APBN	63
Gambar 41. Rapat Pembahasan Standar Kualitas Hasil Kerja APHP tanggal 29 Maret 2023	64
Gambar 42. Dialog Kinerja Organisasi Ditjen PDSPKP Tahun 2023.....	66
Gambar 43. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi capaian kinerja, dan evaluasi rencana aksi lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2022 pada Tanggal 2 Januari 2023.....	66
Gambar 44. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2023 pada Tanggal 18-20 Januari 2023.....	66
Gambar 45. Sosialisasi dan Gerai Konsultasi Sertifikat GMP/SSOP.....	73
Gambar 46. Proses Integrasi SKP Online dengan OSS.....	73
Gambar 47. Sosialisasi Aplikasi Neng Geulis di lingkup Direktorat Pemasaran	73
Gambar 48. Workshop Pembekalan Program Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan BBP3KP	73
Gambar 49. Persiapan Penyusunan Laporan BMN Tahun 2022.....	82
Gambar 50. Uji Petik Evaluasi Pemanfaatan BMN.....	83
Gambar 51. Cek Fisik BMN di Benoa dan Bitung	83
Gambar 52. Pembahasan Usulan Perubahan RKBMN Tahun 2023	83
Gambar 53. Pendampingan Pemeriksaan Fisik Kapal Jananuraga	83
Gambar 54. Kegiatan Percepatan Validasi Data Bidang PDSPKP Tahun 2022 di Beberapa Provinsi	86

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023

Realisasi Anggaran Menurut Satker lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja

berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2022 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem

logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Usaha dan Investasi;
3. Direktorat Logistik;
4. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
5. Direktorat Pemasaran.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

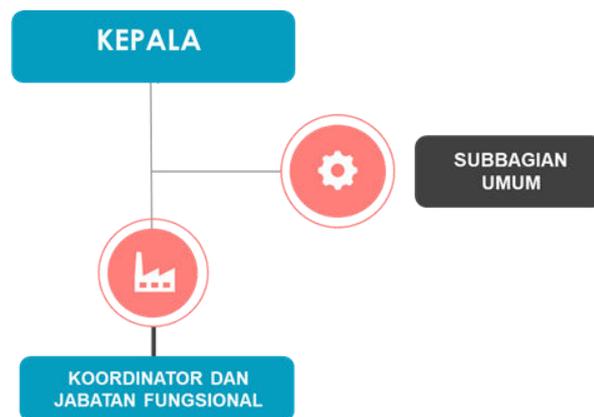
Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;

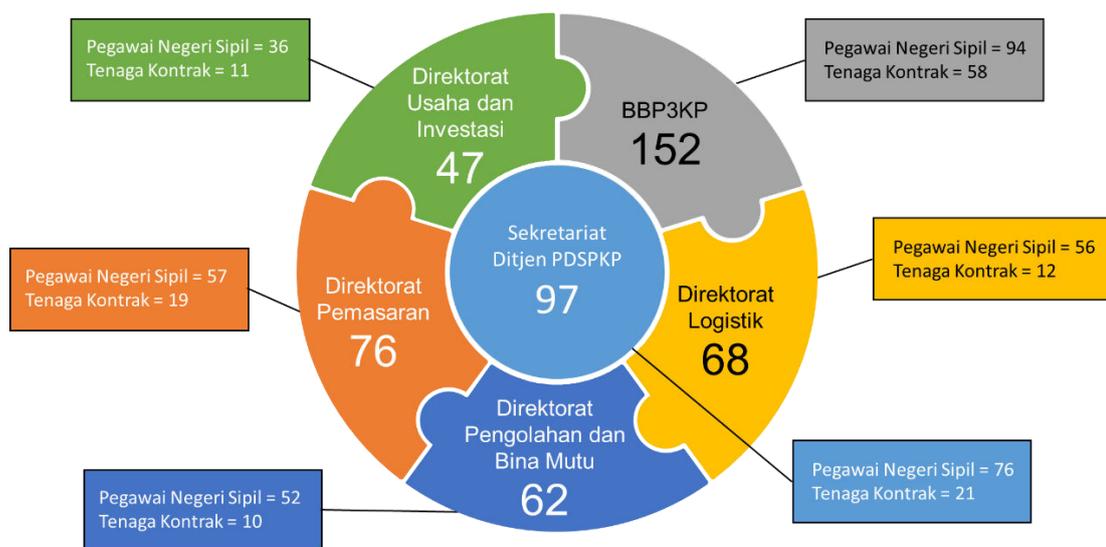
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP

D. Keragaman Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2023 mencapai 502 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3. Keragaman SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2023

E. Permasalahan Utama

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terbagi dalam enam kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, tantangan peningkatan ekspor ikan, ancaman *stunting*, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro-kecil, dan permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan. Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur perikanan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah. Kesulitan akses pembiayaan terutama terjadi pada pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan, karena belum bankable dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur potensial. Beberapa pelaku usaha masih mengalami hambatan berusaha dan investasi terutama terkait perijinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, tantangan yang dihadapi adalah minimnya informasi peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan yang salah satunya karena ketersediaan profil investasi yang *ready to offer* serta promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (ijin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan online yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, BUMN, dan swasta belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di

Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada ranking *timeline* 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (ranking 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vietnam, dan Malaysia).

Di sisi sarana dan prasarana logistik, ketersediaan *cold storage*, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan, kapasitasnya juga masih terbatas. Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit. Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra distribusi/pemasaran yang membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat. Hal ini perlu dipecahkan dengan mengembangkan sistem telusur logistik ikan (STELINA) yang lebih baik dan implementasinya dapat berimprovisasi dengan *IoT system*.

Untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dalam pencapaian target ekspor, yaitu:

- Kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal;
- Belum kompetitifnya produk perikanan di pasar utama dunia (rendahnya *market share*);
- Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT);
- Adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil;
- Rendahnya utilitas UPI untuk tujuan ekspor.

Ancaman *stunting* (gizi buruk) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. *Stunting* timbul salah satunya karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap ikan, terutama di wilayah pedalaman dan aksesnya jauh ke pesisir, harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi. Akibatnya, sering tidak peduli dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, mutu ikan yang dijual di pasar-pasar yang jauh dari pesisir terutama yang pengelolaannya tradisional umumnya kurang baik, sehingga minat beli masyarakat turun. Beberapa wilayah juga belum menjadikan ikan sebagai sumber utama protein bagi keluarganya. Pemenuhannya diperoleh dari sumber nabati yang konsumsinya juga terbatas. Dalam hal pengembangan usaha skala mikro-kecil, kapasitas produksi dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkannya masih rendah, padahal menjadi pelaku utama dalam penyediaan produk ikan di Indonesia termasuk ke pasar-pasar pedalaman. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan. Hingga saat ini, jumlah usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan masih di bawah 1%.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro-kecil di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro-kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klusterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perijinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, masih minim pembinaan, padahal dari segi jumlah pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai

Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, *traceability*) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Hal ini terus berulang setiap tahunnya, dan beberapa yang tidak kuat bersaing terpaksa menutup usahanya.

Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*), dan belum memiliki sertifikat lingkungan. Permasalahan ini menjadi penghambat beberapa usaha pengolahan skala menengah besar dalam memanfaatkan peluang ekspor produk kelautan dan perikanan. Hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi ikan dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan *online*, lelang *online*, dan *block chain* dalam penelusuran bahan baku/logistik ikan perlu dilakukan. Perizinan *online* perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

LKj Ditjen PDSPKP

mengacu pada
Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun
2014

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum tentang Ditjen PDSPKP, dengan penekanan kepada aspek strategis Ditjen PDSPKP.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 dan analisisnya.

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Ditjen PDSPKP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran Ditjen PDSPKP serta gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PDSPKP, maka dirumuskan visi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

VISI

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sejalan dengan visi tersebut, telah dirumuskan misi Ditjen PDSPKP berupa upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

MISI

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Penguatan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

Tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain:

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, yaitu dengan berbagai upaya untuk :
 - Meningkatkan nilai investasi pada usaha kelautan dan perikanan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan *joint venture*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kemitraan investasi, jumlah fasilitasi perizinan, ketertarikan terhadap promosi investasi, dan pemanfaatan paket investasi yang disediakan pemerintah.
 - Mengembangkan usaha hasil kelautan dan perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini yang ditunjukkan dengan meningkatnya pelayanan pembiayaan usaha, berkembangnya kemitraan inti plasma dan sejenisnya, meningkatnya penjangkauan akses debitur, pendampingan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*), tumbuhnya wirausaha baru, magang calon wirausaha, serta penguatan inkubator bisnis.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil kelautan dan perikanan, yaitu upaya pengembangan aktivitas logistik yang memiliki jaringan/konektivitas yang kuat di pusat produksi, pusat pengumpulan produk, pusat distribusi, dan pasar produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya struktur ekonomi pelaku logistik produk kelautan dan perikanan, kebutuhan dan ketersediaan produk yang lebih terjamin, sarana penyimpanan dan *buffer stock* hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi baik, sistem distribusi dan jasa logistik yang berjalan baik, tata niaga dan pengelolaan koridor logistik yang lebih baik.
3. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri, merupakan upaya untuk :
 - Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting*, yang ditunjukkan dengan meningkat aktivitas transaksi di pasar ikan

modern, pasar ikan ikan bersih, pasar ikan lokal, dan sentra kuliner, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan dan bazar produk perikanan, menyebarnya peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri, meningkatnya pemanfaatan alat dan sarana pemasaran ikan yang diberikan oleh pemerintah, berkurangnya penyakit akibat gizi buruk dan protein kurang, dan terjadinya penguatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui berbagai sarana.

- Meningkatkan ekspor hasil perikanan, yang ditunjukkan dengan berkembangnya jaringan perdagangan internasional hasil perikanan baik secara bilateral, regional maupun multilateral, dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
4. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah, yaitu berbagai upaya untuk :
- Meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu baik pada UPI skala menengah besar maupun UPI skala mikro kecil, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku UPI, meningkatnya utilitas UPI, meningkatnya pengurusan sertifikat dan standar mutu pada UPI, dan berkembangnya aktivitas fasilitasi sarana prasarana pengolahan ikan.
 - Meningkatkan perusahaan produk bernilai tambah, yang ditunjukkan dengan berkembangnya UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, berkembangnya UPI yang menggunakan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta meningkatnya produk produk inovasi yang bernilai tambah.
 - Menambah kepedulian terhadap kelayakan pengolahan di UPI, yang ditunjukkan dengan terumuskannya standar kelayakan pengolahan hasil perikanan, penerbitan SNI produk kelautan dan perikanan, dan pengurusan SKP secara *online*.
5. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan,

yaitu upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan terpercaya yang ditunjukkan dengan dukungan manajemen yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSPKP, dukungan sarana dan prasarana internal yang mumpuni, layanan perkantoran yang cepat dan bersih.

Arahan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada 4 (empat) bidang tersebut dijelaskan :

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan (bidang usaha dan investasi). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
 - Kebijakan PDSPKP-1 : Peningkatan investasi kelautan dan perikanan
 - Kebijakan PDSPKP-2: Pengembangan usaha kelautan dan perikanan
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil Kelautan dan perikanan (bidang logistik). Arahan kebijakannya adalah :
 - Kebijakan PDSPKP-3 : Pengembangan sistem logistik ikan dalam rangka konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor)
3. Meningkatkan ekspor hasil perikanan (bidang pemasaran). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
 - Kebijakan PDSPKP-4 : Fasilitasi dan keikutsertaan Indonesia dalam forum dialog/persidangan skala internasional dan promosi terkait dengan produk perikanan Indonesia di pasar internasional.
4. Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting* (bidang pemasaran). Arahan kebijakannya adalah :
 - Kebijakan PDSPKP-5 : Fasilitasi dan pemberian bantuan pemerintah dan pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, kelompok usaha dalam rangka meningkatkan konsumsi makan ikan dan pengurangan *stunting* dalam masyarakat

5. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah (bidang pengolahan dan bina mutu). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-6 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala menengah besar
- Kebijakan PDSPKP-7 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro kecil
- Kebijakan PDSPKP-8 : Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah
- Kebijakan PDSPKP-9 : Penerapan standar kelayakan pengolahan di Unit Pengolahan Ikan (UPI)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2022, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,5
4	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,10
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6
		7.	Nilai PNBK Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600
5	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25
6	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5
		11.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4
		12.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		14.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		15.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		16.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75
		17.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		18.	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		19.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89
		20.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		22.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5
24.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan Maret 2023. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4. NKO Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I 2023	Persentase terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	TW I 2023		Tahun 2023	TW I 2023	
1	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35				
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77	1,56	1,36*	20,09	87,18
3	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,5				
4	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,1	1,59	2,13**	34,92	133,96
5	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58				
6	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6	1,92	0,97	10,10	50,52
7	Nilai PNPB Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65				
8	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600				
9	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25				
10	Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5				
11	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4				
12	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)*	3,1				
13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2				
14	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5				
15	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5				
16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75	75	88,46	117,95	117,95

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I 2023	Persentase terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I 2023		Tahun 2023	TW I 2023
17	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75			
18	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	92	100	108,70
19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89			
20	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86			
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5			
22	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5			
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5			
24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90			

*angka sementara

**angka prognosa

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

1. Volume produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 10 yaitu : (1) Pengalengan, (2) Pembekuan, (3) Penggaraman/Pengeringan, (4) Pemindangan, (5) Pengasapan/Pemanggangan, (6) Fermentasi/Peragian, (7) Pereduksian/Ekstraksi, (8) Pelumatan Daging/Surimi, (9) Penanganan Produk Segar/Dingin, dan (10) Pengolahan Lainnya.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35	-	7,5	-	-	-	-	-	-

Volume produk olahan hasil kelautan dan perikanan berdaya saing ditargetkan sebesar 7,35 juta ton pada tahun 2023. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dihitung pada triwulan I tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp218.215.750,- sampai dengan Bulan Maret 2023. Realisasi tersebut setara dengan 1,54% terhadap pagu awal sebesar Rp14.150.000.000,- atau setara dengan 2,75% terhadap pagu pasca Auto Adjustment sebesar Rp7.930.000.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Fasilitasi Sertifikasi *Good Manufacturing Practices* (GMP)/Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 1.082 produk;
- b. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada 230 unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil;
- c. Pembinaan ragam dan nilai tambah produk kepada 125 unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil;
- d. Pembinaan UPI skala menengah dan besar kepada 85 industri;
- e. Penyusunan pedoman pendataan utilitas dan volume produk olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar (VPO UPI MB);
- f. Penyusunan kuesioner pendataan utilitas dan VPO UPI MB;
- g. Pembentukan Enumerator Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB;
- h. Sosialisasi Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB kepada Enumerator;



Gambar 5. Sosialisasi Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB kepada Enumerator

- i. Pemberian layanan sertifikasi SNI dan pengujian produk kelautan dan perikanan sebagai upaya penjaminan mutu serta peningkatan

daya saing produk olahan. Kegiatan layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan dilaksanakan bagi 14 produk, sedangkan kegiatan pengujian produk kelautan dan perikanan dilaksanakan bagi 142 produk;



Gambar 6. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk KP Tahun 2023

- j. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan: (a) Penyusunan 1 (satu) Media Informasi yaitu pencetakan banner Satker Ambon dan (b) Penyebarluasan informasi melalui 6 (enam) event di Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang dengan total penerima informasi 205 orang.



Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

Sasaran Program 2. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode *Harmonized System* (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari BPS.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan

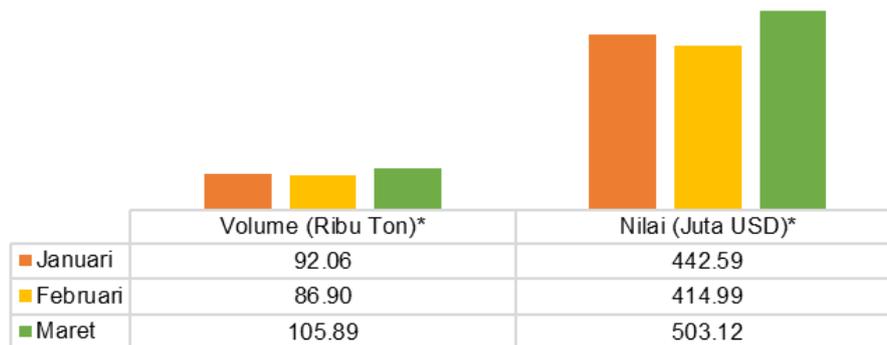
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77	1,56	8	1,36*	20,10	87,22	17,01	1,53	-11,29

*angka sementara s.d Bulan Maret 2023

Sumber Data: BPS, April 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia triwulan I tahun 2023 mencapai USD 1,36 Miliar (angka sementara). Capaian tersebut setara dengan 87,22% terhadap target triwulan I tahun 2023 (USD 1,56 Miliar) atau 20,10% terhadap target tahun 2023 (USD 6,77 Miliar). Jika dibanding target jangka menengah tahun 2024 (USD 8 Miliar), maka capaian ini telah mencapai 17,01%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2022 yakni USD 1,53 Miliar, maka capaian triwulan I tahun 2023 turun sebesar 11,29%.

Nilai ekspor hasil perikanan triwulan I tahun 2023 berkontribusi sebesar 2,02% terhadap nilai ekspor nasional triwulan I tahun 2023 sebesar USD 67,20 Miliar (angka sementara) atau 2,15% terhadap nilai ekspor non migas triwulan I tahun 2023 yakni sebesar USD 63,19 Miliar (angka sementara) (BPS, April 2023).



*angka sementara s.d Bulan Maret 2023
 Sumber Data: BPS, April 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 8. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Triwulan I Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan nilai dan volume ekspor hasil perikanan Bulan Februari 2023, maka baik nilai maupun volume ekspor hasil perikanan Bulan Maret 2023 naik sebesar 21,24% dan 21,84%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Bulan Maret 2022, maka nilai ekspor hasil perikanan Bulan Maret 2023 turun sebesar 8,87%, sedangkan volume ekspornya naik sebesar 10,07%.

Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan I Tahun 2023

Jenis Komoditas	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
Cumi-Sotong-Gurita	31,760,860.82	11.15	153,407,472.41	11.27
Rajungan-Kepiting	8,104,317.41	2.85	106,199,523.09	7.80
Rumput Laut	58,599,230.98	20.57	133,129,621.46	9.78
Tuna-Tongkol-Cakalang	52,114,851.43	18.30	223,742,224.93	16.44
Udang	56,476,103.88	19.83	444,971,859.76	32.70
Lainnya	77,796,824.17	27.31	299,252,334.78	21.99
Total	284,852,188.68		1,360,703,036.44	

*angka sementara s.d Bulan Maret 2022
 Sumber Data: BPS, April 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Terdapat 5 (lima) jenis komoditas utama ekspor dari Indonesia antara lain udang, tuna-tongkol-cakalang, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting, dan rumput laut. Selain lima jenis komoditas utama tersebut, terdapat komoditas lainnya meliputi mutiara, tilapia, ikan hias, hati-telur ikan, sarden, kerapu, surimi, layur, dan sebagainya dengan kontribusi 21,99% atau USD 299,25 Juta. Nilai ekspor hasil perikanan triwulan I

tahun 2023 didominasi komoditas udang dengan kontribusi mencapai 32,70% atau sebesar USD 444,97 Juta.

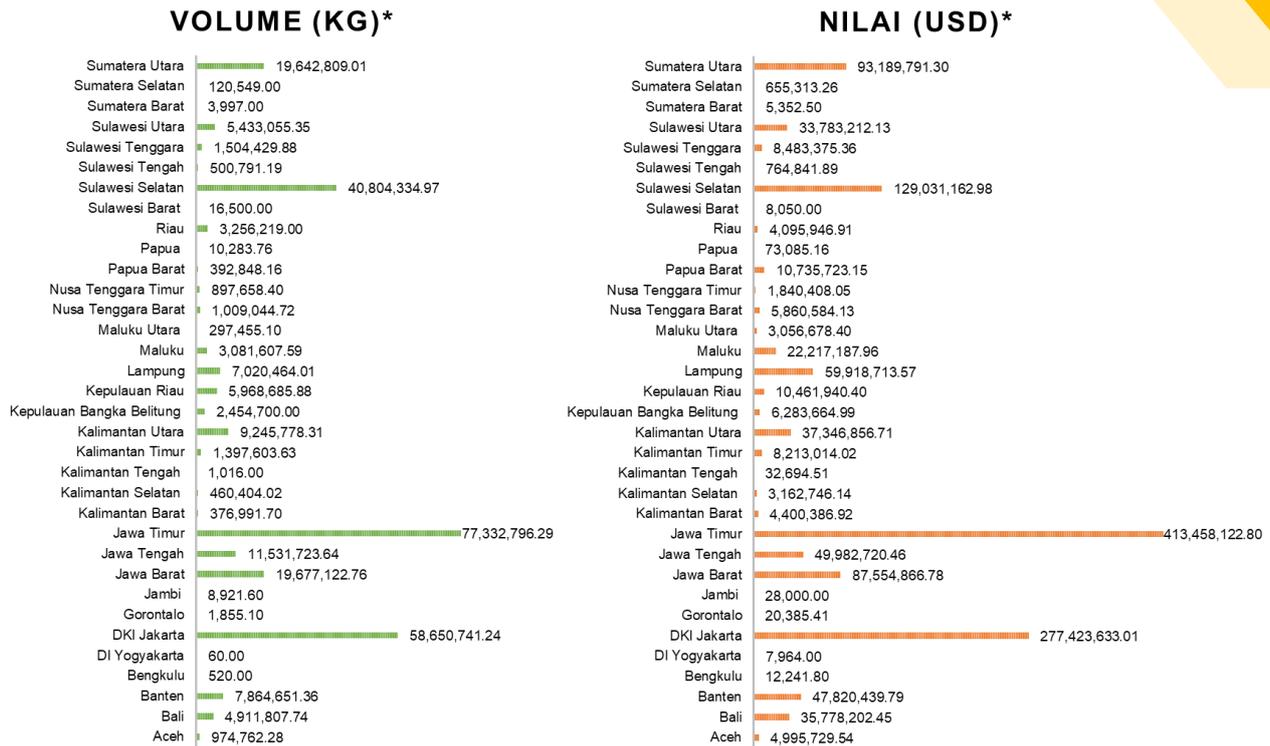
Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan I Tahun 2023

Negara Tujuan	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
China	91,590,550.38	32.15	253,804,455.47	18.65
Japan	32,509,285.22	11.41	174,419,560.34	12.82
United States	55,035,793.94	19.32	480,447,711.58	35.31
ASEAN	49,868,442.65	17.51	161,569,905.19	11.87
Uni Eropa	13,197,182.07	4.63	82,516,180.77	6.06
Timur Tengah	9,378,472.44	3.29	38,059,593.51	2.80
Lainnya	33,272,461.98	11.68	169,885,629.57	12.49
Total	284,852,188.68		1,360,703,036.44	

*angka sementara s.d Bulan Maret 2022

Sumber Data: BPS, April 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Berdasarkan negara tujuan, nilai ekspor produk perikanan terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar USD 480,45 Juta (35,31%), China sebesar USD 253,80 Juta (18,65%), Jepang sebesar USD 174,42 Juta (12,82%), ASEAN sebesar USD 161,57 Juta (11,87%), Uni Eropa sebesar USD 82,52 Juta (6,06%), dan Timur Tengah sebesar USD 38,06 Juta (2,80%). Sedangkan negara lainnya seperti Australia, Kanada, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya memiliki kontribusi sebesar 12,44% atau USD 169,89 Juta.



*angka sementara s.d Bulan Maret 2023
 Sumber Data: BPS, April 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 9. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan I Tahun 2023

Dari gambar di atas diketahui bahwa terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan terbesar yaitu (1) Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 30,39%, (2) Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 20,39%, dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 9,48%.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan triwulan I tahun 2023 antara lain :

- a. Penurunan permintaan impor produk perikanan di pasar Amerika Serikat sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama disebabkan terkoreksinya rantai pasokan sejak kenaikan permintaan tertinggi pada awal tahun 2021 akibat gejolak pandemi covid-19 yang berimbas pada kelebihan pasokan dan penurunan harga.
- b. Inflasi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebagai contoh, volume impor beberapa produk

perikanan utama di Amerika Serikat hingga Februari 2023 mengalami penurunan, yaitu:

- Udang (produk utama ekspor Indonesia) turun sekitar 23 Ribu ton atau setara dengan -15,82% (YoY);
 - Kepiting/rajungan (produk utama ekspor Indonesia) turun sekitar 5 Ribu ton atau setara dengan -35,45% (YoY);
 - Cumi-Sotong-Gurita (produk utama ekspor Indonesia) turun sekitar 9,5 Ribu ton atau setara dengan -44,09% (YoY).
- c. Diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT). Beberapa kendala ekspor non-tarif antara lain adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil.

Adapun rencana tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan, antara lain :

- a. Menyelesaikan potensi hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat;
- b. Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan;
- c. Membantu fasilitasi UKM melalui *Business Matching* Indonesia dengan Singapura;
- d. Percepatan pemenuhan nomor registrasi *Saudi Food and Drugs Authority* (SFDA) UPI dalam rangka ekspor ke Arab Saudi dalam rangka pasokan untuk katering Haji 2023 untuk produk Patin, Lele, Bandeng, dan Tuna olahan;
- e. Melakukan persiapan dan perumusan posisi dan strategi perundingan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF) dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan;

- f. Pengembangan dan sosialisasi Bursa Ikan dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan berbasis elektronik melalui media digital serta mendukung program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Budidaya;
- g. Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran seafood skala internasional;
- h. Penyelenggaraan *Foreign Buyer Mission* produk seafood di Indonesia.

Pada triwulan I tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan sebesar Rp15.550.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp6.522.223.050,-. Realisasi anggaran ini setara dengan 41,94% terhadap total pagu anggaran.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan IV Tahun 2022, antara lain:

- a. Keikutsertaan dalam dua pameran internasional yang diselenggarakan pada triwulan I tahun 2023, antara lain : (1) *Seafood Expo North America* (SENA) pada tanggal 12-14 Maret 2023 di Boston, Amerika Serikat yang diikuti oleh 14 eksportir dengan produk seperti udang kupas beku, daging rajungan/kepiting kaleng, fillet tilapia beku, tuna loin (beku/segar), tuna kaleng, dan lain-lain, serta menghasilkan nilai potensi transaksi sebesar USD 54,1 Juta; dan (2) *Indonesian Hajj Expo 2023* pada tanggal 1-2 Februari 2023 di Jeddah Arab Saudi yang diikuti oleh diikuti para pelaku usaha yang terdiri para calon penyedia layanan katering jemaah haji Indonesia, para importir dan pemasok produk-produk Indonesia, serta pengusaha UKM Indonesia dan menghasilkan nilai potensi perdagangan sebesar USD 4,87 Juta;
- b. Melakukan negosiasi penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang khususnya penurunan tarif produk tuna olahan melalui pertemuan dengan perwakilan dari *Ministry of Agriculture, Fisheries and Forestry* di Tokyo, Jepang pada tanggal 16-17 Maret 2023;

- c. Melakukan sosialisasi Bursa Ikan dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan berbasis elektronik melalui media digital di Kota Batam tanggal 15 Maret 2023;
- d. Menyelenggarakan *Business Matching* Indonesia dengan Singapura bekerjasama dengan SFA yang telah dilaksanakan pada 22 Februari 2023;
- e. Melakukan pertemuan *Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group* (ISAWG) dalam rangka upaya peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia ke Singapura yang dilaksanakan di kota Batam tanggal 16 Maret 2023;
- f. Melakukan pertemuan dalam rangka menyelesaikan pengumpulan informasi tambahan terkait *preliminary information sheet* sebagai tahap awal pengajuan Sertifikasi Udang Tangkapan di Amerika Serikat yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 dan 29 Maret 2023;
- g. Melakukan pertemuan percepatan pemenuhan nomor registrasi *Saudi Food and Drugs Authority* (SFDA) UPI dalam rangka ekspor ke Arab Saudi dalam rangka pasokan untuk katering Haji 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 dan 9 Februari 2023.



Gambar 10. Partisipasi KKP dalam *Seafood Expo North America* (SENA) di Boston, Amerika Serikat pada Tanggal 12-14 Maret 2023



Gambar 11. Partisipasi KKP dalam Indonesian Hajj Expo 2023 yang Diselenggarakan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah

Sasaran Program 3. Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional

3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,5	-	62,5	-	-	-	-	-	

Konsumsi ikan tahun 2023 ditargetkan sebesar 57,5 kg/kapita. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2023.

Pada triwulan I tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Konsumsi Ikan sebesar Rp57.132.132.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp10.291.108.093,-. Realisasi anggaran ini setara dengan 18,01% terhadap total pagu anggaran.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan IV Tahun 2022, antara lain:

- a. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diselenggarakan sebanyak 26 promosi, terdiri dari kegiatan Perluasan Safari Gemarikan dalam rangka pencegahan stunting gizi buruk (14 promosi), Talkshow CNBC (1 promosi), Journalist Fest (1 promosi), Nautica Fest (1 promosi), Bazar Bappenas (1 promosi), Bazar Umkm Thrive (1 promosi), Bazar Produk Perikanan KKP (3

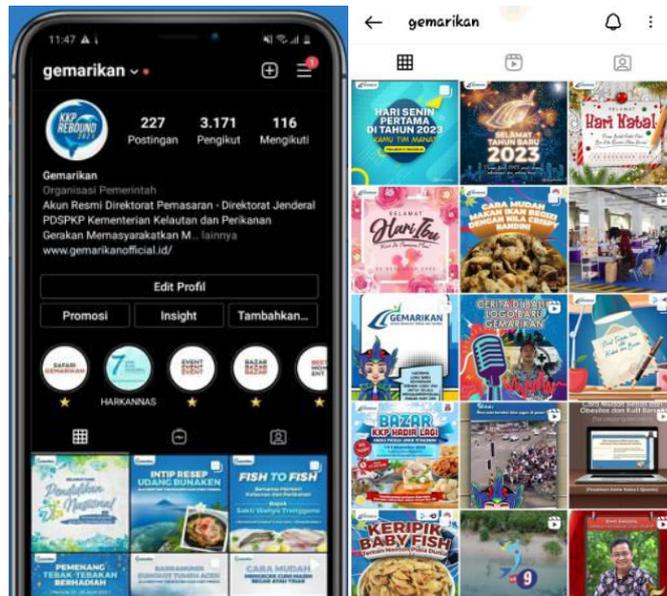
- promosi), Promosi Media Sosial (3 promosi), Promosi Aplikasi Gemarikan (1 promosi);
- b. Kegiatan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah dalam rangka persiapan pelaksanaan Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada tanggal 20-22 Februari 2023 di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Puncak acara Gernas BBI-BBWI di Sulawesi Tengah disepakati akan dilaksanakan pada minggu I Bulan Agustus 2023, tentatif tanggal 4-6 Agustus 2023 dan diusulkan akan dilaksanakan di kota yang menjadi ikon kota Palu;
 - c. Pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan pasar ikan yang telah dilaksanakan sebanyak 21 lembaga yaitu PIB Kab. Bone Bolango, PIB Kab. Buru, PIB Kota Prabumulih, PIB Kab. Probolinggo, PIB Kab. Aceh Utara, PIB Kota Sorong, PIB Kota Padang, PIB Kab. Kutai Timur, PIB Kab. Maluku Tengah, PIB Kab. Jembrana, PIB Kab. Manggarai Barat, PIB Kab. Banyuwangi, PIB Kab. Sampang, PIB Kab. Lebak, PIB Kab. Mamuju Tengah, PIM Muara Baru Kota Jakarta Utara, Senkul Kab. garut, Senkul Kab. Sambas, Senkul Kab. Lampung Selatan, PIM Soreang Kab. Bandung, Pasar Ikan Konsumsi Kab. Purbalingga;
 - d. Progres pengadaan batuan pemerintah peralatan pemasaran (coolbox) sampai dengan bulan maret sedang tahap revisi Juknis dan tahap penginputan data usulan Bantuan Pemerintah, usulan yang sudah masuk sebanyak 1.230 unit Cool Box yang terdiri dari 100 Kelompok Pengolah dan Pemasar;
 - e. Progres pencapaian kegiatan sampai dengan bulan Maret 2023 adalah dalam proses SK Penerima Kendaraan Pemasaran ATI sebanyak 3 (tiga) penerima yang tersebar dalam Kab. Cianjur, Kab. Bogor, dan Kab. Magelang dan proses penayangan Kendaraan Pemasaran ATI beserta sarana pendukungnya pada e-catalog Sektoral KKP.



Gambar 12. Safari Gemarikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku pada Tanggal 20 Maret 2023



Gambar 13. Safari Gemarikan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 6 Maret 2023



Gambar 14. Promosi/Kampanye melalui Media Sosial Gemarikan Tahun 2023



Gambar 15. Persiapan Pelaksanaan Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Kota Palu

Sasaran Program 4. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan

4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan

Ikan Terukur. Selain itu untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp Triliun)	6,1	1,59	6,43	2,13*	34,92	133,96	33,13	1,45	46,90

*angka prognosa

Realisasi nilai investasi KP pada triwulan I tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp2,13 Triliun. Capaian ini setara dengan 34,92% terhadap target tahun 2023 yakni Rp6,1 Triliun atau setara dengan 133,96% terhadap target triwulan I tahun 2023 sebesar Rp1,59 Triliun. Nilai investasi KP pada triwulan I tahun 2023 juga setara 33,13% terhadap target jangka menengah tahun 2024 sebesar Rp6,43 Triliun. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2022 yakni sebesar Rp1,45 Triliun, maka realisasi investasi triwulan I tahun 2023 diperkirakan naik sebesar 46,90%. Faktor yang mempengaruhi hal ini

belum dapat dianalisa lebih lanjut, sehubungan angka ini masih merupakan angka perkiraan.



Gambar 16. Angka Perkiraan Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan I Tahun 2022-2023 (Rp Triliun)

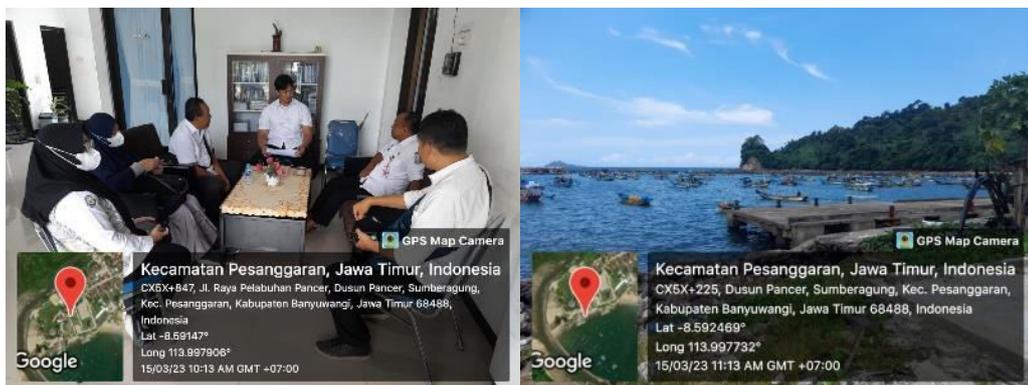
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran melalui APBN sebesar Rp2.386.981.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp418.909.911,- (17,55%). Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian nilai investasi kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- a. Pemetaan peluang investasi
 - Identifikasi dan koordinasi lokus potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
 - Koordinasi rencana pembangunan Kampung Nelayan Maju di Pancer, Banyuwangi, serta survei kebutuhan sarana prasarana hilirisasi perikanan
- b. Promosi investasi
 - Promosi peluang investasi usaha KP di Kota Bitung
 - Promosi peluang investasi usaha KP di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Waropen
 - Promosi peluang investasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi

- UMKM Kelautan dan Perikanan *Thrive Expo*
- c. Pendampingan investasi
 - Pelayanan dan perizinan usaha pengolahan hasil perikanan
 - Pendampingan investasi usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, NTB
 - Pendampingan investasi usaha pengolahan rumput laut di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
 - Pendampingan kemitraan investasi usaha pengolahan rumput laut di Provinsi Jawa Timur



Gambar 17. Identifikasi dan Koordinasi Lokus Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Kebumen



Gambar 18. Pemetaan Peluang Investasi Usaha KP di Wilayah Kabupaten Banyuwangi



Gambar 19. Promosi Peluang Investasi Usaha KP di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Waropen

5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) diperlukan untuk mengukur performa dari sistem logistik ikan di suatu koridor yang ditentukan. Angka capaian IKLI berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja sistem logistik ikan yang telah berjalan berdasarkan dimensi pembentuknya. Penghitungan IKLI menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan instrumen kuesioner kepada instansi terkait, pelaku jasa logistik, dan pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Adapun formulasi penghitungan IKLI yaitu:

$$IKLI = \sum_{i=1}^n \left(\frac{V_i \times (A_i / (\text{Skor Max A}) \times 100\%)}{5} + \frac{W_i \times (B_i / (\text{Skor Max B}) \times 100\%)}{5} + \frac{X_i \times (C_i / (\text{Skor Max C}) \times 100\%)}{5} + \frac{Y_i \times (D_i / (\text{Skor Max D}) \times 100\%)}{5} + \frac{Z_i \times (E_i / (\text{Skor Max E}) \times 100\%)}{5} \right) / n$$

Keterangan :

A : Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan

B : Dimensi Efisiensi

C : Dimensi Konektivitas

D : Dimensi Manfaat

E : Dimensi Tata Kelola

V : Bobot Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan

W : Bobot Dimensi Efisiensi

X : Bobot Dimensi Konektivitas

Y : Bobot Dimensi Manfaat

Z : Bobot Dimensi Tata Kelola

i : Koridor

n : Jumlah koridor

Saat ini, penghitungan IKLI berdasarkan pada moda transportasi laut. Penilaian IKLI tahun 2023 dilakukan pada 6 koridor logistik, yaitu:

1. Bitung – Surabaya/Jakarta
2. Kupang – Surabaya/Jakarta
3. Kendari – Surabaya/Jakarta
4. Mimika – Surabaya/Jakarta
5. Ambon – Surabaya/Jakarta
6. Makassar – Surabaya/Jakarta

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan

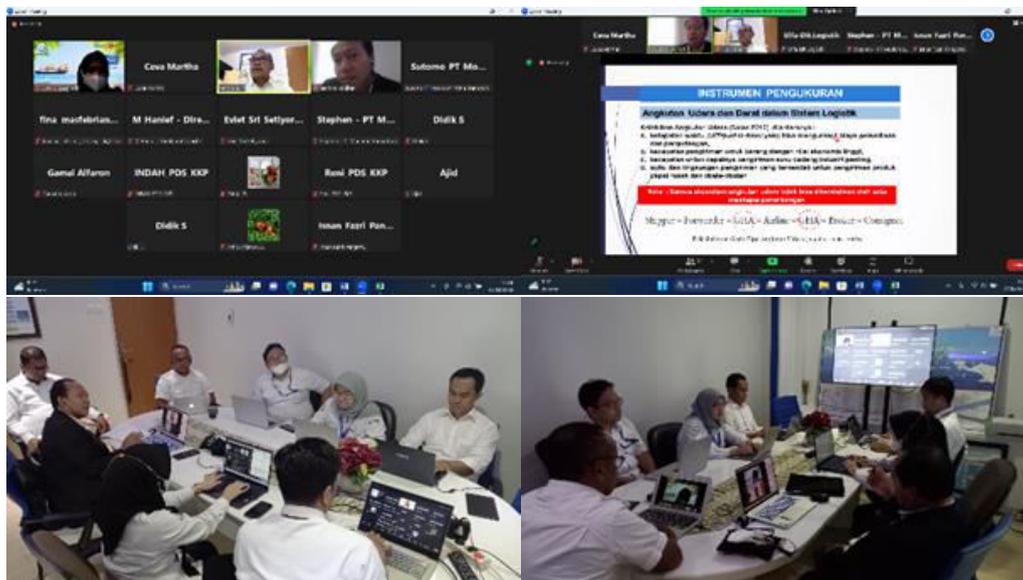
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58	-	60	-	-	-	-	-	-

Kinerja logistik hasil perikanan tahun 2023 ditargetkan sebesar 58. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaian tidak dapat dihitung pada triwulan I tahun 2023.

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian IKLI antara lain:

- a. Pembahasan pengembangan Indeks Kinerja Logistik Ikan pada moda transportasi Darat dan Udara yang dilakukan pada 16 Februari 2023 dan 27 Maret 2023. Pembahasan ini dilakukan melalui diskusi dengan akademisi dan pelaku usaha logistik perikanan pada moda transportasi darat dan udara. Dengan adanya pembahasan tersebut, diharapkan pengembangan IKLI pada moda transportasi Darat dan Udara dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan tepat.
- b. Penyusunan laporan penghitungan IKU Kinerja Logistik Hasil Perikanan Tahun 2023.
- c. Penyesuaian manual penghitungan IKU Kinerja Logistik Hasil Perikanan. Penyesuaian yang dilakukan adalah penjabaran proses penghitungan IKLI secara lebih detail.

Pagu anggaran untuk kegiatan penghitungan indeks kinerja logistik adalah sebesar Rp352.026.000,- dengan realisasi pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar Rp27.044.784,- atau sebesar 7,68% dari pagu anggaran.



Gambar 20. Pembahasan pengembangan Indeks Kinerja Logistik Ikan pada moda transportasi Darat dan Udara, Jakarta 27 Maret 2023



Gambar 21. Pembahasan pengembangan Indeks Kinerja Logistik Ikan pada moda transportasi Darat dan Udara, Bogor 16 Februari 2023

6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program menunjukkan jumlah realisasi pembiayaan kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (nonbank) kepada UMKM kelautan dan perikanan (KP). Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP dengan melakukan pemantauan penyaluran kredit program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh Holding Ultra Mikro, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar. Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, diantaranya fasilitasi akses pembiayaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) baik di pusat maupun daerah, pendampingan usaha, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit program.

Adapun formulasi penghitungan sebagai berikut:

$$K = \sum KUR + \sum KUMi$$

Keterangan :

K = Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan

\sum KUR = Nilai realisasi pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan yang berasal dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR)

\sum KUMi = Nilai realisasi pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan yang berasal dari lembaga keuangan nonbank yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

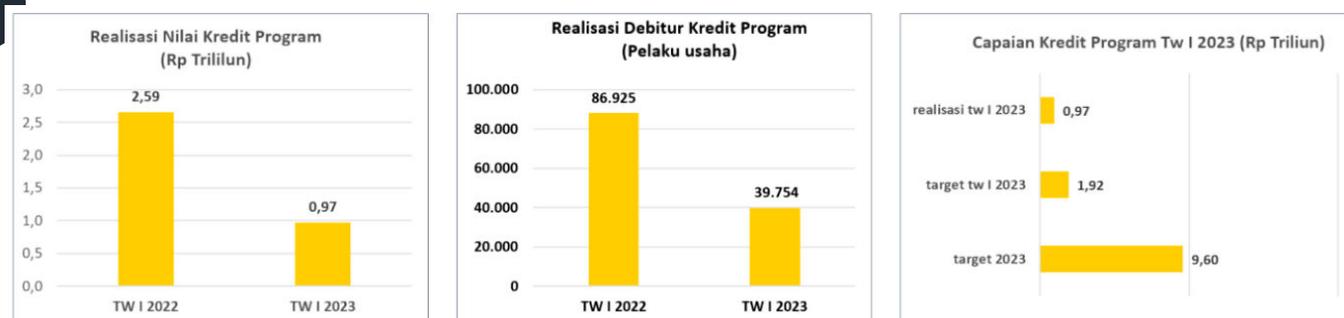
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp Triliun)	9,6	1,92	7,05	0,97	10,10	50,52	13,76	2,59	-62,55

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, April 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Tabel 11. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2023

Sumber Pembiayaan	Nilai (Rp)	Debitur (Pelaku Usaha)	Persentase terhadap Total Nilai (%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	780.276.803.014	4.981	80,51
Ultra Mikro (UMi)	188.846.500.000	34.773	19,49
Total	969.123.303.014	39.754	100

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, April 2023, diolah Ditjen PDSPKP



Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, April 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 22. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2023

Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program pada triwulan I tahun 2023 mencapai Rp0,97 Triliun yang disalurkan kepada 39.754 pelaku usaha KP. Capaian ini setara dengan 50,52% terhadap target triwulan I tahun 2023 sebesar Rp1,92 Triliun atau setara dengan 10,10% terhadap target tahun 2023 sebesar Rp9,6 Triliun. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024

(Rp7,05 Triliun) maka capaian triwulan I tahun 2023 telah mencapai 13,76%.

Jika dibandingkan dengan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program pada triwulan I tahun 2022, maka capaian triwulan I tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 62,55%. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan kebijakan KUR tahun 2023 yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, yaitu:

- a. Tingkat suku bunga KUR dinaikan kembali menjadi sebesar 6% untuk skema mikro, kecil, dan khusus, yang sebelumnya sebesar 3%. Sementara untuk skema super mikro, suku bunga dipertahankan sebesar 3% sebagaimana skema pada masa pandemi (2021-2022);
- b. Suku bunga 6% berlaku untuk debitur yang baru pertama kali mengakses KUR. Untuk setiap pengambilan ulang, maka berlaku kenaikan tingkat bunga secara bertahap (graduasi) yaitu suku bunga 7% untuk pengambilan KUR ke-2, suku bunga 8% untuk pengambilan KUR ke-3, dan suku bunga 9% untuk pengambilan Kur ke-4. Khusus skema super mikro, suku bunga tetap sebesar 3% meskipun pengambilan KUR berulang. Pada peraturan sebelumnya, tingkat bunga tidak berubah untuk setiap pengambilan ulang;
- c. Pembatasan maksimal akses KUR per debitur yaitu maksimal 4 kali untuk usaha produktif dan 2 kali untuk usaha non produktif (seperti perdagangan) untuk skema mikro, kecil, dan khusus. Khusus skema super mikro, tidak ada pembatasan jumlah pengambilan ulang. Pada peraturan sebelumnya, tidak ada pembatasan jumlah pengambilan ulang KUR.

Dengan adanya kebijakan baru tersebut diatas, pola penyaluran dan target KUR mengalami perubahan, sehingga pada triwulan I tahun 2023 para penyalur KUR memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian pada sistem penyaluran pembiayaannya secara internal maupun yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Kredit Program, baik di tingkat pusat maupun cabangnya.

Oleh karena itu direkomendasikan agar Ditjen PDSPKP melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada pelaku usaha KP tentang kebijakan KUR terbaru melalui pendampingan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP), serta melakukan koordinasi intensif dengan penyalur KUR melalui Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan untuk percepatan penyaluran KUR di sektor KP.

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program sebesar Rp3.209.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp290.708.963 atau setara dengan 9,06%.

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian nilai pembiayaan usaha KP melalui kredit program antara lain :

- a. Merekrut Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Kehadiran TPUKP melalui fasilitasi Gerai Investasi dan Layanan Usaha (Gisela) turut berkontribusi pada penyaluran kredit program, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan nonbank. Sampai dengan triwulan I 2023, TPUKP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,64 milyar kepada 75 pelaku usaha.
- b. Pembentukan Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Kepmen KP Nomor 53 Tahun 2023, yang beranggotakan perwakilan Eselon I terkait lingkup KKP, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Keuangan Penyalur KUR. Pokja ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pihak untuk sinergi kegiatan dalam rangka percepatan penyaluran kredit program di sektor KP.
- c. Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui fasilitasi akses pembiayaan di Kota Cirebon dan pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan

akses pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan di 8 lokasi.



Gambar 23. Kegiatan Identifikasi Lokasi dan Debitur Potensial Fasilitas Akses Pembiayaan



Gambar 24. Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan

7. Nilai PNBPDitjen PDSPKP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Adapun formulasi yang digunakan dalam penghitungan nilai PNBPDitjen PDSPKP adalah sebagai berikut:

$$\text{PNBP}_{\text{PDSPKP}} = \text{PNBP}_{\text{Logistik}} + \text{PNBP}_{\text{Pemasaran}} + \text{PNBP}_{\text{BBP3KP}}$$

Keterangan :

$\text{PNBP}_{\text{PDSPKP}}$ = Nilai PNBP bidang PDSPKP

$\text{PNBP}_{\text{Logistik}}$ = Nilai PNBP lingkup Direktorat Logistik

$\text{PNBP}_{\text{Pemasaran}}$ = Nilai PNBP lingkup Direktorat Pemasaran

$\text{PNBP}_{\text{BBP3KP}}$ = Nilai PNBP lingkup BBP3KP

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp Miliar)	8,63	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, nilai PNBP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar Rp8,63 Miliar. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya tidak dilakukan pengukuran pada triwulan I tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

Berdasarkan Aplikasi Omspan Kemenkeu diketahui terdapat capaian nilai PNBP sebesar Rp208.940.500,-. yang bersumber dari BBP3KP. Nilai tersebut diperoleh dari penerimaan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya yaitu sebesar Rp63.010.000,- dan dari penggunaan sarana dan prasarana oleh *stakeholder*, yaitu pemanfaatan ruangan, sewa ruang pameran, kolam, akuarium, bak *fiber glass* sebesar Rp145.930.500,-. Meskipun demikian, capaian ini tidak dilakukan pengukuran di SAPK.

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian nilai PNBP Ditjen PDSPKP antara lain :

- a. Rapat Finalisasi Petunjuk Teknis Penyimpanan Ikan antara Tim Ditjen PDSPKP dengan Mitra CS 1000 ton (PT. Jaladhi Hita Abadi,

- PT. Spektra Tirta Sakti dan PT. Sakana Umi Nusantara Bahari) di Cold Storage 1000 Ton pada tanggal 24 Februari 2023;
- b. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Sewa Kendaraan Berpendingin antara KKP dan PT Perikanan Indonesia di RR. Akses Pasar GMB III Lantai 15 KKP pada tanggal 1 Maret 2023;
 - c. Perjanjian sewa gedung bangunan PIM Muara Baru antara Ditjen PDSPKP KKP dan PT Perindo telah berakhir pada 27 Januari 2023, dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian sewa. Berdasarkan catatan hasil revidi Ditjen KKP pada 9 Februari 2023, nilai sewa tahun 2023 minimal sama seperti tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.402.542.000,00 dan telah disetujui oleh PT. Perindo. Saat ini telah disiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk perpanjangan sewa 1 tahun. Pasca berakhirnya perjanjian sewa dalam masa transisi pada 27 Januari 2023, Ditjen PDSPKP KKP akan memproses perjanjian sewa baru dan mengajukan persetujuan sewa BMN dari Kementerian Keuangan.

8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik baik dibidang logistik hasil kelautan dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, usaha dan investasi dan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan. Adapun formulasi yang digunakan dalam penghitungan tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk KP adalah sebagai berikut:

$$TK_{PDS} = TK_{log} + TK_{pel} + TK_{sar} + TK_{UI} + TK_{PP}$$

Keterangan :

TK_{PDS} = Tenaga kerja di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

TK_{log} = Tenaga kerja di bidang logistik hasil KP

TK_{pel} = Tenaga kerja di bidang pengolahan hasil KP

TK_{sar} = Tenaga kerja di bidang pemasaran hasil KP

TK_{UI} = Tenaga kerja di bidang usaha investasi hasil KP

TK_{PP} = Tenaga kerja di bidang pengujian penerapan hasil KP

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tenaga kerja yang terlibat bidang PDSPKP ditargetkan sebesar 49.600 orang. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya tidak dihitung pada triwulan I tahun 2023. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Sasaran 5. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat

9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

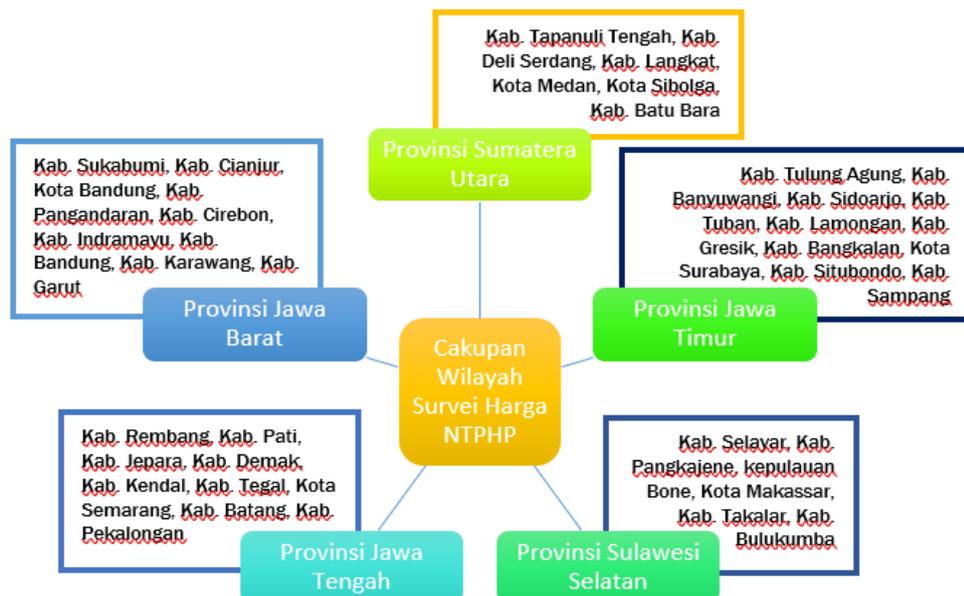
Secara konseptual nilai tukar pengolah hasil perikanan adalah pengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolah hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. NTPHP dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NTPHP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

Keterangan :
 NTPHP = Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan
 I_t = Indeks harga yang diterima
 I_b = Indeks harga yang dibayar

NTPHP dihitung berdasar *sampling* yang akan dilakukan di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi. Lokasi yang menjadi *sampling* dipilih berdasarkan kesepakatan antara Ditjen PDSPKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pengambilan tahun dasar untuk perhitungan NTPHP di tahun 2015. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah banyaknya jumlah UPI terutama skala mikro dan kecil dan variasi jenis kegiatan pengolahan ikan pada kelima provinsi tersebut sehingga dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 25. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Nilai)	104,25	-	104,75	-	-	-	-	-	

Target Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) tahun 2023 adalah sebesar 104,25. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya tidak dapat dihitung pada triwulan I tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.628.218.950,- sampai dengan bulan Maret 2023. Realisasi ini setara dengan 3,76% terhadap pagu anggaran awal sebesar Rp43.320.745.000,- atau setara dengan 5,23% terhadap pagu anggaran pasca *Auto Adjustment* (AA) sebesar Rp31.106.740.000,-.

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan IV Tahun 2022, antara lain:

- a. Koordinasi pembentukan Tim NTPHP tahun 2023 yang terdiri dari Tim Pusat dan Tim Daerah pada Tanggal 19 Januari 2023;
- b. Penyusunan agenda/jadwal kegiatan NTPHP pada Tanggal 24 Februari 2023;
- c. Penyusunan Listing, Kuisisioner dan Buku Pedoman Survey NTPHP pada Tanggal 8 Februari 2023;
- d. Koordinasi Pengembangan Aplikasi NTPHP pada Tanggal 2 Maret 2023.



Gambar 26. Koordinasi Pembentukan Tim NTPHP Tahun 2023



Gambar 27. Penyusunan Buku Listing dan Kuisiner NTPHP



Gambar 28. Pengembangan Aplikasi NTPHP

Sasaran 6. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP

10. Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang meliputi: (1) Manajemen Perubahan; (2) Deregulasi Kebijakan; (3) Penataan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan SDM Aparatur; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Penguatan Pengawasan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) *Quick Wins*.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi KKP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu KKP harus segera mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi KKP.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ditjen PDSPKP sebagai salah satu unit kerja eselon I yang membidangi daya saing produk kelautan dan perikanan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5	-	34	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 33,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada triwulan I tahun 2023. Penilaian indikator kinerja ini akan dilakukan Kementerian PAN dan RB atau Inspektorat Jenderal KKP jika tidak ada penilaian dari Kementerian PAN dan RB.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP tanggal 16 Januari 2023;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023;
- c. Pembahasan Penataan Mekanisme Kerja pada Ditjen PDSPKP tanggal 24 Januari 2023;
- d. Pembahasan Proses Bisnis dan Organisasi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 30 Januari 2023;
- e. Monev Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Direktorat Pemasaran tanggal 30 Januari 2023;
- f. Kegiatan Pembahasan Usulan Proses Bisnis, Kajian Teknis, dan Tugas Fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 8 Februari 2023;
- g. Pembahasan usulan Uraian Tugas dan Fungsi Tim Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 28 februari 2023;
- h. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik dalam mewujudkan Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP yang Inklusif dan Prima tanggal 6 s.d 7 Maret 2023;

- i. Finalisasi Usulan Tim Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP dan Inventarisasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi tanggal 14 s.d 16 Maret 2023;
- j. Pembahasan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 28 Maret 2023.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 973.314.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 78.581.600 (8,07%) pada triwulan I Tahun 2023.



Gambar 29. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP



Gambar 30. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

11. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat hasil penilaian indikator pengungkit dan indikator hasil lebih besar atau sama dengan 75 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan.

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Unit Kerja Berpredikat menuju WBK Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit Kerja)	4	-	2	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebanyak 4 unit kerja. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan pada akhir tahun 2023.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melakukan kegiatan pengumpulan dokumen WBK lingkup Direktorat PBM Tahun 2022 pada tanggal 9 Februari 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Bogor;
- b. Melakukan kegiatan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM lingkup Direktorat PBM Tahun 2023 dengan Tim Inspektorat IV pada tanggal 10 Februari 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Bogor;
- c. Melakukan *Review* Pelaksanaan Penilaian Pembangunan Zona Integritas lingkup Direktorat PBM oleh Tim Inspektorat V pada tanggal 13-17 Februari 2023 di Ruang Rapat SKP, GMB III Lantai 13 KKP;
- d. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BBP3KP setiap bulan;
- e. Melakukan morning briefing RB lingkup Ditjen PDSPKP pada hari Senin minggu pertama dan lingkup BBP3KP dilaksanakan hari Senin minggu kedua;
- f. Telah dilakukan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di BBP3KP oleh Inspektorat IV, dengan nilai 84,32 yang terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 47,78 (Nilai Pemenuhan 24,27 dan Nilai Reform 23,51) dan nilai Komponen Hasil sebesar 36,54;
- g. Penilaian pendahuluan pembangunan ZI di Direktorat Pemasaran telah dilaksanakan pada tanggal 20-21 Maret 2023 dengan hasil penilaian yaitu 85,77 dengan total pengungkit 49,69 dan total hasil 36,08 serta masing-masing area telah memenuhi syarat minimal 60%;

- h. Melakukan koordinasi, melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, serta menindaklanjuti hasil reviu Itjen KKP pada periode tahun sebelumnya.



Gambar 31. Pengumpulan Dokumen WBK Direktorat PBM Tahun 2022 pada tanggal 9 Februari 2023



Gambar 32. Pertemuan antara Direktorat PBM dan Itjen KKP pada Tanggal 10 Februari 2023



Gambar 33. Review Pelaksanaan Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Direktorat PBM oleh Inspektorat V



Gambar 34. Kegiatan persiapan dan penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada BBP3KP oleh Inspektorat IV

12. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 3,1. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan I tahun 2023.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Pada tanggal 4 Januari 2023 melaksanakan rapat dengan tim SPIP Ditjen PDSPKP dalam rangka membahas penyusunan Laporan SPIP triwulan IV Tahun 2022 dan penyusunan peta risiko serta form manajemen risiko tahun 2022, sesuai undangan Sekretaris Ditjen PDSPKP nomor B.31/DJPDSPKP.0/TU.330/I/2023 tanggal 3 Januari 2023;
- b. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 Februari 2023.

13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2	-	76	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, indeks profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 83,2. Indikator kinerja ini bersifat semesteran, sehingga capaiannya tidak dihitung pada triwulan I tahun 2023. Capaian bisa diperoleh melalui website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn#/ip-asn/eselon>.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) dan Pedoman Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan pada tanggal 18-20 Januari 2023 tanggal 4 Januari 2023;
- b. Rapat persiapan revisi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2018 tentang Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 Januari 2023 sesuai dengan undangan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP Nomor B.128/DJPDSPKP.0/TU.330/I/2023 tanggal 5 Januari 2023;
- c. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional APHP dan Pembina Mutu tanggal 6 Januari 2023;
- d. Rapat Koordinasi Pengisian Formasi Pegawai Ditjen PDSPKP melalui Aplikasi SSCASN tanggal 2 Januari 2023;
- e. Rapat Pembahasan Permasalahan Tugas Belajar dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur tanggal 5 Januari 2023;
- f. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur tanggal 9 Januari 2023;
- g. Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP) tanggal 12 Januari 2023;
- h. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu dan Asisten Pembina Mutu (PM/APM) tanggal 20 Januari 2023;

- i. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin Kinerja Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2022 tanggal 25 Januari 2023;
- j. Rapat Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023-2026 dalam rangka Penyusunan Formasi Sumber Daya Manusia Aparatur tanggal 30 Januari 2023;
- k. Kegiatan Penguatan Budaya Kerja ASN Berakhlak lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP tanggal 9 s.d 12 Maret 2023;
- l. Kegiatan Olahraga Bersama di Monas dalam rangka Pembinaan Karakter dan Disiplin SDM Aparatur tanggal 10 Februari 2023;
- m. Pembahasan Bahan Ajar Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional APHP & PMHKP dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP tanggal 10 Februari 2023;
- n. Sosialisasi Jabatan Fungsional Perekayasa dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur tanggal 14 Februari 2023;
- o. Kegiatan dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP tanggal 17 Februari 2023;
- p. Kegiatan uji kompetensi JF PMHKP dalam rangka pengembangan jabatan fungsional binaan PDSPKP tanggal 21 Februari 2023;
- q. Pelantikan Jabatan Fungsional dan Sumpah Pegawai APK APBN tanggal 28 Februari 2023;
- r. Rapat Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 - 2024 dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai tanggal 1 Maret 2023;
- s. Rapat Penyusunan Data Analisis Potensi dan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural tanggal 13 dan 31 Maret 2023;
- t. kegiatan Penguatan Budaya Kerja ASN Berakhlak tanggal 9 s.d 12 Maret 2023;
- u. Rapat Pembahasan Standar Kualitas Hasil Kerja APHP tanggal 29 Maret 2023.



Gambar 35. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur



Gambar 36. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin Kinerja Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2022



Gambar 37. Pembahasan Bahan Ajar Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional APHP dan PM HKP dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP



Gambar 38. Kegiatan dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP



Gambar 39. Kegiatan Uji Kompetensi JF PM HKP dalam rangka Pengembangan JF binaan PDSPKP



Gambar 40. Pelantikan JF dan Sumpah Pegawai APK APBN



Gambar 41. Rapat Pembahasan Standar Kualitas Hasil Kerja APHP tanggal 29 Maret 2023

14. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5	-	84,75	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, nilai PMSAKIP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga belum dinilai di triwulan I tahun 2023. Penilaian atas PMSAKIP Ditjen PDSPKP akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP atau mandiri jika tidak ada penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Mengesahkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dengan tanggal pengesahan 11 April 2023;
- b. Menyusun draft Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023;
- c. Menyusun perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target indikator kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan matriks cascading lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023;
- d. Menyelenggarakan Dialog Kinerja Organisasi Ditjen PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 6 Januari 2023 bertempat di RR. Mutiara, GMB III Lantai 14 KKP;
- e. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan. Kegiatan-kegiatan dimaksud telah dilakukan dengan melibatkan pejabat eselon II (Sesditjen PDSPKP) karena akan mempengaruhi penilaian pada aspek pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP dalam hal keterlibatan pimpinan;
- f. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Eselon I lingkup KKP, serta *stakeholders* terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;
- g. Kegiatan penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 pada tanggal 9 Februari 2023 di RR. Rustami, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Sempur, Bogor;

- h. Kegiatan Evaluasi Program Kegiatan Periode Januari s.d Februari Tahun 2023 pada tanggal 7 Maret 2023 bertempat di RR. Karaginan GMB III Lantai 14 KKP.



Gambar 42. Dialog Kinerja Organisasi Ditjen PDSPKP Tahun 2023



Gambar 43. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi capaian kinerja, dan evaluasi rencana aksi lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2022 pada Tanggal 2 Januari 2023



Gambar 44. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2023 pada Tanggal 18-20 Januari 2023

15. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2022.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5	-	≤1	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar ≤0,5%. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum ada surat resmi terkait nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP Tahun 2022 sehingga capaiannya belum bisa dihitung.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melakukan pendampingan pemeriksaan BPK di Kota Kupang pada tanggal 10 Februari 2023 atas pembangunan pabrik es yang dibangun Direktorat Logistik bersama tim teknis dari pelaksana konstruksi dan konsultan pengawas;
- b. Mengadakan rapat pembahasan hasil pemeriksaan BPK di Kota Kupang pada tanggal 15 Maret 2023 dengan tim teknis dari pelaksana konstruksi dan konsultan pengawas.

16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$%RHP = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

%RHP = Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP

$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Ditjen PDSPKP

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75	75	80	88,46	117,95	117,95	110,58	96,34	-8,18

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 88,46%. Capaian ini setara dengan 117,95% terhadap target tahun 2023 yaitu 75% atau 117,95% terhadap target triwulan I tahun 2023 yaitu 75%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 96,34%, maka capaian triwulan I tahun 2023 turun sebesar 8,18%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian ini setara dengan 110,58%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Pada tanggal 8 Maret 2023 dilakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan Itjen baik berupa audit, reuiu, evaluasi maupun pemantauan yang dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan Inspektorat Jenderal. Sebelum dilakukan pembahasan, capaian tindak lanjut unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP per tanggal 6 Maret 2023 adalah sebesar 96,88% dengan jumlah rekomendasi berstatus proses sebanyak 17 dan pending 18. Pada saat pembahasan dengan Inspektorat Jenderal, masing-masing pemilik kegiatan dari unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP menyampaikan dokumen tindak lanjut sehingga beberapa rekomendasi sudah dinyatakan tuntas sehingga realisasi naik menjadi 98,21% dengan jumlah rekomendasi berstatus proses sebanyak 19 dan pending 1.
- b. Pada tanggal 31 Maret 2023 dilakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan Itjen untuk periode sampai dengan triwulan I 2023. Capaian tindak lanjut unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 98,33% dengan jumlah rekomendasi berstatus proses sebanyak 15 dan pending 4.

17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75	-	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh Ditjen PDSPKP, diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh koordinator Reformasi. Pada tahun 2023, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan I tahun 2023. Selain itu indikator kinerja ini baru di tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi mencakup : Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Dapat Ditransfer/Direplikasi dan Berkelanjutan. Sedangkan Kelompok Inovasi mencakup : Kelompok Umum dan Kelompok Khusus. Perhitungan Perhitungan capaian untuk Aspek Penilaian Kelompok Umum : Ringkasan (5%), Ide Inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (5%),

Adaptabilitas (20%), Keberlanjutan (20%) dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%). Aspek Penilaian Kelompok Khusus mencakup Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan Keberlanjutan (25%) dan Evaluasi (30%).

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Sosialisasi dan gerai konsultasi sertifikat GMP/SSOP di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 16 Februari 2023 dan Provinsi DIY pada tanggal 16-17 Maret 2023;
- b. Melakukan proses integrasi SKP Online dengan OSS;
- c. Koordinasi penerapan QR-code dan Barcode pada layanan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI di BBP3KP dengan Pusdatin pada tanggal 20 Februari 2023;
- d. Persiapan kegiatan Invapro Kape pada 12 Januari 2023 melalui zoom meeting antara tenant Inbis Invapro-KP tahun 2023 dengan tim Inbis Invapro-KP;
- e. Melaksanakan *workshop* pembekalan program Invapro Kape BBP3KP pada tanggal 16-18 Februari 2023 di Hotel Sultan Jakarta;
- f. Sosialisasi inovasi pelayanan publik berupa Dashboard Neng Geulis di lingkup Direktorat Pemasaran pada tanggal 5-6 Januari 2023;
- g. Melakukan pembaharuan pada Dashboard Neng Geulis, yaitu penambahan menu-menu lain seperti data ekspor, data angka konsumsi ikan, pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemasaran (pasar ikan, sentra kuliner ikan, peralatan pemasaran), serta kampanye Gemarikan;
- h. Melakukan penyiapan proposal inovasi pelayanan publik “Si Ikan Berprotein” dan “GISELA”.



Gambar 45. Sosialisasi dan Gerai Konsultasi Sertifikat GMP/SSOP



Gambar 46. Proses Integrasi SKP Online dengan OSS



Gambar 47. Sosialisasi Aplikasi Neng Geulis di lingkup Direktorat Pemasaran



Gambar 48. Workshop Pembekalan Program Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan BBP3KP

18. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Ditjen PDSPKP.

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	92	86	100	108,70	108,70	116,28	100	-

Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 108,7% terhadap target tahun 2023 yakni 92% atau 108,7% terhadap target triwulan I tahun 2023 yakni 92%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 yakni 86, maka capaian triwulan I tahun 2023 setara dengan 116,28%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pengumpulan data user (email) untuk pembuatan user aplikasi manajemen pengetahuan (bitrix24) bagi yang belum memiliki sekaligus melakukan pembaharuan nama pegawai dalam struktur organisasi;
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan (bitrix24) melalui: a) Penyimpanan dokumen secara online, b) Polling dan penyampaian penghargaan, c) Sirkulasi Undangan/Pengumuman secara online, d) Data umum pegawai berdasarkan struktur organisasi, e) Jadwal dan hasil kegiatan, f) Disposisi, dan g) Percakapan dan komunikasi.
- c. Setiap menjelang akhir triwulan, dilakukan *warning system* kepada pejabat eselon 2, koordinator kelompok dan sub koordinator terhadap keaktifannya dalam menggunakan aplikasi bitrix24 sebagai alat penilaian IKU.

19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89	-	90	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 89 (Baik). Indikator kinerja ini bersifat semesteran sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan I tahun 2023. Capaian akan diperoleh melalui Aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 Februari 2023.

20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan

pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	-	89	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 86 (Baik). Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan I tahun 2023. Capaian akan diperoleh melalui Aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	80	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melakukan penginputan rencana umum pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SIRUP melalui LPSE KKP, yaitu: (1) seluruh paket pengadaan melalui Penyedia pada Satker Pusat telah diumumkan dalam SIRUP baik yang swakelola maupun penyedia yang dilaksanakan melalui e-purchasing, tender, dan pengadaan langsung; dan (2) melakukan revisi RUP pengadaan dikarenakan adanya perbaikan paket dan telah diumumkan ulang di aplikasi SIRUP melalui LPSE KKP;
- b. Melaksanakan kegiatan pemantauan penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tanggal 15 s.d 17 Maret 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP dan Tim Inspektorat IV – Itjen KKP. Selain itu pada tanggal yang sama juga dilakukan pemantauan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dilingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP.

22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
- b. Memiliki anggaran besar
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional
- e. Merupakan arahan direktif presiden
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan

Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	-	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP terus melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada Dinas Kab/Kota atau masyarakat pada tahun 2022 dan termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP.

23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut :

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023;
- d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Mengadakan pertemuan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 11 Januari 2023 di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon dan diikuti oleh Para Subkoordinator Tata Usaha, Operator SAKTI Modul Komitmen, Operator SAKTI Modul Persediaan dan Aset Tetap, serta Tim Reviu dari Inspektorat IV Itjen KKP dan Biro Keuangan KKP;
- b. Melakukan pendampingan uji petik Tim Inspektorat IV - Itjen KKP dalam rangka Evaluasi Pemanfaatan BMN berupa kendaraan berpendingin dan kendaraan bermotor pick up tahun 2022-2023 di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, serta Kota Denpasar Provinsi Bali pada tanggal 20 s/d 22 Februari 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya atas pemanfaatan kendaraan berpendingin oleh PT Perikanan Indonesia;
- c. Mengadakan pertemuan dalam rangka pembahasan usulan perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 07 Maret

2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unit kerja eselon 2 dilingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP, serta Tim Reviu dari Inspektorat IV Itjen KKP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas usulan rencana pengadaan kendaraan jabatan tahun anggaran 2023 dilingkungan Ditjen PDSPKP melalui mekanisme perubahan RKBMN Tahun 2023. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah usulan perubahan RKBMN tahun 2023 Direktorat jenderal PDSPKP;

- d. Melakukan pendampingan pemeriksaan fisik Kapal Jananuraga bersama Tim Kementerian Sekretariat Negara RI di Dermaga CT-3 BPKS Sabang pada tanggal 16 s/d 18 Maret 2023. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Biro Keuangan KKP dan Inspektorat IV Itjen KKP. Pemeriksaan fisik Kapal Jananuraga dilakukan oleh Tim Kementerian Sekretariat Negara dilaksanakan dalam rangka persetujuan penghapusan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden RI;
- e. Mengajukan usulan penetapan status penggunaan barang milik negara (BMN) kepada: (1) Biro Keuangan KKP atas BMN berupa peralatan dan mesin senilai total Rp.1.763.540.943,00 sebagaimana surat Nomor B.1338/DJPDSPKP.0/PL.710/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dan (2) KPKNL Jakarta II atas BMN berupa peralatan dan mesin senilai total Rp.2.039.504.000,00 sebagaimana surat Nomor B.1902/DJPDSPKP.0/PL.710 /III/2023 tanggal 29 Maret 2023.



Gambar 49. Persiapan Penyusunan Laporan BMN Tahun 2022



Gambar 50. Uji Petik Evaluasi Pemanfaatan BMN



Gambar 51. Cek Fisik BMN di Bena dan Bitung



Gambar 52. Pembahasan Usulan Perubahan RKBMN Tahun 2023



Gambar 53. Pendampingan Pemeriksaan Fisik Kapal Jananuraga

24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan dapat dipercaya menjadi dambaan dan kebutuhan setiap organisasi. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis menuntut Ditjen PDSPKP untuk mampu menyediakan data secara tepat, akurat dan terkini. Sangat disadari bahwa ketersediaan data-data tersebut akan banyak membantu dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan setiap organisasi, baik pemerintah, swasta, organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi sosial budaya maupun organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat. Data PDSPKP yang akurat akan menghasilkan proses perencanaan yang benar dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan para pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Ditjen PDSPKP sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkup KKP, mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik sesuai Amanah Pasal 46 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Dinas yang menangani Kelautan dan Perikanan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup Ditjen ditargetkan sebesar 90%. Capaian indikator kinerja ini belum bisa diketahui pada triwulan I tahun 2023 karena indikator kinerja bersifat tahunan.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Menghadiri kegiatan percepatan validasi data bidang PDSPKP tahun 2022 di beberapa Provinsi, seperti:
 - Provinsi Kalimantan Barat 13 Maret 2023
 - Provinsi Kalimantan Timur 13 Maret 2023
 - Provinsi Jawa Tengah, 17 Maret 2023
 - Provinsi Lampung, 21 Maret 2023
 - Provinsi Jawa Barat, 22 Februari 2023
 - Provinsi DIY, 21 Maret 2023
- b. Rekonsiliasi Data lingkup Ditjen PDSPKP bertempat di Bogor pada tanggal 3-5 Januari 2023;
- c. Rapat Pembahasan harga acuan ikan bertempat di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023;
- d. Rapat penyusunan profil pelaku usaha PDSPKP bertempat di Jakarta pada tanggal 12-13 Januari 2023;
- e. Percepatan validasi data bidang PDSPKP bertempat di Jakarta pada tanggal 18-20 Januari 2023;
- f. Rapat koordinasi pendataan harga ikan pada tanggal 2 Februari 2023;
- g. Rapat persiapan workshop pendataan harga ikan pada tanggal 6 Februari 2023;
- h. Workshop pendataan harga ikan tahun 2023 bertempat di Bandung pada tanggal 12-15 Februari 2023;
- i. Kunjungan kerja dan koordinasi pendataan ekspor impor di wilayah perbatasan Nunukan pada tanggal 22 Februari 2023;
- j. Koordinasi pendataan ekspor impor hasil perikanan tahun 2023 bertempat di Bogor pada tanggal 25-27 Februari 2023;
- k. Pembahasan populasi UPI MK pada tanggal 28 Februari 2023;

- I. Rapat pembahasan pedoman pendataan bidang PDSPKP pada tanggal 8 Maret 2023.



Gambar 54. Kegiatan Percepatan Validasi Data Bidang PDSPKP Tahun 2022 di Beberapa Provinsi

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2023, anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp388.500.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Setelah adanya *Auto Adjustment* (AA) sebesar Rp80.943.119.000,- (delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah), pagu anggaran Ditjen PDSPKP menjadi Rp307.556.881.000,- (tiga ratus tujuh miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Tabel 30. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan I Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Pusat	326.906.679.000	27.062.006.508	8,28
2	UPT	35.970.109.000	5.597.825.016	15,56
3	Dekonsentrasi	25.623.212.000	-	-
4	Tugas Pembantuan	-	-	-
Total		388.500.000.000	32.659.831.524	8,41

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu per tanggal 14 April 2023

Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2023

No	Sumber Pembiayaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	77.844.186.000	1.889.915.280	2,43
2	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	79.380.069.000	6.871.678.173	8,66
3	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	60.870.745.000	1.846.434.700	3,03
4	Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	24.000.000.000	1.344.429.642	5,60
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP	138.080.000.000	18.972.896.979	13,74
6	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.325.000.000	1.734.476.750	20,83
Total		388.500.000.000	32.659.831.524	8,41

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu per tanggal 14 April 2023

Pada triwulan I tahun 2023, penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp32.659.831.524,- (tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Realisasi ini setara dengan 8,41% terhadap total pagu anggaran awal atau 10,62% pagu anggaran pasca AA.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2023 yaitu proses pengadaan barang dan jasa gagal lelang sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kontrak. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, antara lain:

- 1) Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak;
- 2) Mereviu RKAKL sesuai rencana kegiatan dan segera melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/kegiatan;
- 3) Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai dengan ketentuan; dan
- 4) Melibatkan Bagian Program, Bagian Keuangan dan Umum, serta Itjen KKP dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Ditjen PDSPKP pada Tahun 2023, yang tercermin dalam capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja.

Terdapat perubahan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga tidak selaras dengan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024, sehingga pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Target	
			Renstra	PK
1	Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	Rp Triliun	3,60	9,6
2	Nilai PNBK Ditjen PDSPKP*	Rp Miliar	-	8,65
3	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP*	Orang	-	49.600
4	Persentase unit kerja yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen PDSPKP	%	84	92
5	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP	Indeks	76	83,2
6	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP*	%	-	77,5
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP*	%	-	77,5

*Indikator kinerja belum tercantum dalam Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada triwulan I tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 95,26.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP triwulan I tahun 2023, terdapat 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan permintaan impor produk perikanan di pasar Amerika Serikat sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama disebabkan terkoreksinya rantai pasokan sejak kenaikan permintaan tertinggi pada awal tahun 2021 akibat gejala pandemi covid-19 yang berimbas pada kelebihan pasokan dan penurunan harga. • Inflasi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebagai contoh, volume impor beberapa produk perikanan utama di Amerika Serikat hingga Februari 2023 mengalami penurunan, yaitu: • Udang (produk utama ekspor Indonesia) turun sekitar 23 Ribu ton atau setara dengan -15,82% (YoY). • Kepiting/rajungan (produk utama ekspor Indonesia) turun sekitar 5 Ribu ton 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan potensi hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat; • Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan; • Membantu fasilitasi UKM melalui Business Matching Indonesia dengan Singapura; • Percepatan pemenuhan nomor registrasi Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) UPI dalam rangka ekspor ke Arab Saudi dalam rangka pasokan untuk catering Haji 2023 untuk produk Patin, Lele, Bandeng, dan Tuna olahan; • Melakukan persiapan dan perumusan posisi dan strategi perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan; • Pengembangan dan sosialisasi Bursa Ikan dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan berbasis elektronik melalui media digital serta mendukung program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Budidaya. • Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran seafood skala internasional. • Penyelenggaraan <i>Foreign Buyer Mission</i> produk <i>seafood</i> di Indonesia.

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	<p>atau setara dengan -35,45% (YoY).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumi-Sotong-Gurita (produk utama ekspor Indonesia) turun sekitar 9,5 Ribu ton atau setara dengan -44,09% (YoY). • Diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT). Beberapa kendala ekspor non-tarif antara lain adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil. 	
<p>Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kebijakan KUR tahun 2023 yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 mengakibatkan adanya perubahan sistem, sehingga perbankan memerlukan waktu untuk melakukan penataan penyaluran pembiayaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi intensif dengan lembaga keuangan penyalur KUR melalui Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan, untuk sinergi kegiatan dan percepatan penyaluran KUR di sektor KP. • Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha KP tentang kebijakan KUR terbaru dan pendampingan intensif TPUKP kepada pelaku usaha binaannya, untuk mendapatkan akses pembiayaan, baik melalui lembaga keuangan bank ataupun nonbank, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2023 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2022 antara lain :

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2022	Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2023
1	Profiling pasar luar negeri untuk mendukung kebijakan dan program prioritas KKP dalam rangka peningkatan ekspor sekaligus mencari alternatif pasar potensial tujuan ekspor produk perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diselenggarakan kegiatan <i>Business Matching</i> Indonesia dengan Singapura bekerjasama dengan SFA yang telah dilaksanakan pada 22 Februari 2023; • Telah dilakukan pertemuan <i>Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group</i> (ISAWG) dalam rangka upaya peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia ke Singapura pada tanggal 16 Maret 2023; • Telah berkoordinasi antara KKP dan BPS terkait penyediaan data ekspor-impor; • Dalam rangka mencari alternatif pasar potensial tujuan ekspor produk perikanan, Ditjen PDSPKP telah berlangganan akses data dari umer barry dan infofish untuk diolah, dianalisa, dan digunakan sebagai pendukung data profil pasar luar negeri.
2	Koordinasi dengan unit kerja lingkup KKP atau kementerian/lembaga terkait dalam rangka memfasilitasi pemasaran, penanganan hambatan ekspor, percepatan penyelesaian perundingan akses pasar luar negeri, dan pemenuhan persyaratan pasar di negara tujuan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pertemuan antara unit kerja lingkup KKP dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) dalam rangka menyelesaikan pengumpulan informasi tambahan terkait <i>preliminary information sheet</i> sebagai tahap awal pengajuan Sertifikasi Udang Tangkapan di Amerika Serikat yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 dan 29 Maret 2023; • Telah dilakukan pertemuan antara KKP, BPOM, Kementerian Agama, Asosiasi Pengusaha <i>Catfish</i> Indonesia (APCI), Asosiasi Pengusaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), percepatan pemenuhan nomor registrasi <i>Saudi Food and Drugs Authority</i> (SFDA) UPI dalam rangka ekspor ke Arab Saudi pada tanggal 11 Januari 2023 dan 9 Februari 2023.
3	Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan atau BKIPM selaku otoritas kompeten bidang mutu dan keamanan hasil perikanan untuk penyelesaian hambatan ekspor dengan China	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pertemuan koordinasi antara KKP dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri dalam rangka percepatan penyelesaian hambatan ekspor ke China pada tanggal 29 Januari 2023, 31 Januari 2023, dan 9 Maret 2023. Status per tanggal 31 Januari 2023, dari 521 UPI yang terdaftar sebanyak 252 UPI telah disetujui dengan perpanjangan sampai 31 Januari 2028.
4	Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan dalam dua pameran internasional yang diselenggarakan pada triwulan I tahun 2023, seperti : (1) <i>Seafood Expo North America</i> (SENA) pada tanggal 12-14 Maret 2023 di Boston, Amerika Serikat dan (2) <i>Indonesian Hajj Expo 2023</i> pada tanggal 1-2 Februari 2023 di Jeddah Arab Saudi.

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2022	Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2023
5	Melakukan koordinasi dengan BPS melalui Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP untuk memperoleh raw data Susenas serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memperbaharui metode penghitungan konsumsi ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Raw data Susenas Tahun 2022 telah disampaikan oleh Pusdatin KKP melalui Nota Dinas PIh. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Nomor 3688/SJ.7/TU.210/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan pada TW I telah dilakukan pengolahan raw data Susenas 2022 menjadi data konsumsi ikan per provinsi per jenis ikan sebagai bahan penghitungan AKI Nasional. • Telah dilakukan pembahasan metode penghitungan AKI diluar rumah tangga bersama dengan tim perumusan angka konsumsi ikan pada tanggal 10 Maret 2023 dan 29 Maret 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong, serta tanggal 27 Maret 2023 di BPS, dengan hasil diskusi: penghitungan AKI diluar rumah tangga dapat menggunakan pendekatan data hasil survei penyedia makanan dan minuman (PMM) meliputi hotel/restoran/katering (horeka) dan survei hotel yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Adapun data hasil survei PMM dan hotel diolah oleh tim perumusan AKI sebagai data dukung penghitungan AKI diluar RT di masing-masing provinsi. • Telah dilaksanakan <i>Workshop</i> Penghitungan AKI Tahun 2023 secara <i>hybrid</i> di Favehotel Padjajaran Bogor dan daring melalui zoom pada tanggal 30-31 Maret 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 34 dinas provinsi dan beberapa dinas kabupaten/kota yang menangani kelautan dan perikanan serta eselon II lingkup PDSPKP dan Pusdatin KKP.
6	Fasilitasi akses pasar produk perikanan di lokasi Kampung Budidaya dan Kampung Nelayan Maju	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan identifikasi pasar di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 10 Februari 2023 bersama dengan pedagang; • Telah dilakukan fasilitasi akses pasar di kampung budidaya gurami dan patin di Tulungagung dan kampung nelayan maju di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Jawa Timur pada tanggal 9 Februari 2023.
7	Koordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) untuk meningkatkan penggunaan ikan sebagai menu makanan utama	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi akses pasar ikan bandeng di kampung budidaya Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9 Februari 2023 dengan melibatkan PHRI, APJI dan pelaku usaha perikanan (pembudidaya, pemasok ikan). Kegiatan ini bertujuan agar hotel dan jasa catering dapat menggunakan ikan sebagai menu utama.
8	Melakukan kegiatan Gemarikan dan penyediaan sarana prasarana pemasaran (sentra kuliner, pasar ikan, dan <i>coolbox</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan 26 promosi kegiatan Gemarikan; • Pembangunan Pasar Ikan Tahun 2023 dengan progress saat ini: <ul style="list-style-type: none"> - PIB Boyolali: telah disampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) CV Marga Jaya; - PIB Kep. Sula: telah dilakukan proses tender pembangunan Pasar Ikan Sula dan masih dalam jadwal masa sanggah; - PIB Pinrang: pengusulan tender ke UKPBJ. • Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2023 dengan progress saat ini: <ul style="list-style-type: none"> - Senkul Singkawang: Pengusulan tender ke UKPBJ - Senkul Sumedang: Evaluasi ulang karena ada sanggahan yang diterima Pokja

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2022	Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2023
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan <i>coolbox</i> tahun 2023 dengan progress saat ini : (1) Proses pengusulan calon penerima dan verifikasi dokumen (1.144 unit <i>coolbox</i>); (2) Proses revisi Juknis Peralatan Pemasaran Tahun 2023 terkait perubahan kapasitas dan material <i>coolbox</i>.
9	<p>Penguatan pencacah dan kelembagaan NTPHP melalui SOP penentuan petugas pencacah termasuk koordinator daerah, menyangkut transfer keterampilan mendata, menginput data, menilai kewajaran naik turun harga, serta, kontinuitas responden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pembentukan Tim NTPHP tahun 2023 yang terdiri dari Tim Pusat dan Tim Daerah; • Penyusunan agenda/jadwal kegiatan NTPHP; • Penyusunan <i>Listing</i>, Kuisisioner dan Buku Pedoman <i>Survey</i> NTPHP; • Koordinasi Pengembangan Aplikasi NTPHP.
10	<p>Terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi UPI, fasilitasi peralatan pengolahan, pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah, penerapan kelayakan pengolahan pada unit pengolahan ikan, gemarikan dalam rangka meningkatkan permintaan masyarakat untuk makanan sehat dan aman dikonsumsi serta pelaksanaan bazar produk perikanan secara berkala</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan ragam dan nilai tambah produk kepada 125 unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil; • Penyusunan pedoman pendataan utilitas dan volume produk olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar (VPO UPI MB); • Penyusunan kuesioner pendataan utilitas dan VPO UPI MB; • Pembentukan Enumerator Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB; • Sosialisasi Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB kepada Enumerator; • Pada tahun 2023 telah dialokasikan sebanyak 315 paket peralatan pengolahan; • Fasilitasi Sertifikasi <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)/Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 1.082 produk; • Telah dilaksanakan 26 promosi kegiatan Gemarikan termasuk di dalamnya kegiatan bazar produk perikanan rutin bulanan di KKP tanggal 12-13 Januari 2023, 9-10 Februari 2023, dan 9-10 Maret 2023, bazar di Bappenas tanggal 18-19 Maret 2023, bazar UMKM <i>Thrive Expo</i> tanggal 6 Maret 2023.





**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Pit. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Ishartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,5
4	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,10
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6
		7.	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600
5	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25
6	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5
		11.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4
		12.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		14.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		15.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	≤0,5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
	16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75
	17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
	18. Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
	19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89
	20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
	21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5
	22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5
	23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5
	24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90

Data Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP.000)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	148.575.814
-	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	79.380.069
-	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	60.870.745
-	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.325.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	101.844.186
-	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	24.000.000
-	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	77.844.186
3	Program Dukungan Manajemen	138.080.000
-	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	138.080.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		388.500.000

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ishartini



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	2356 Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	0 0.00%	76,280,596,000 1,769,546,880 (2.32%)	1,563,590,000 120,368,400 (7.70%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	77,844,186,000 1,889,915,280 (2.43%)
		SISA	0	74,511,049,120	1,443,221,600	0	0	0	0	0	0	75,954,270,720
2	2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	0 0.00%	79,170,869,000 6,871,678,173 (8.68%)	209,200,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	79,380,069,000 6,871,678,173 (8.66%)
		SISA	0	72,299,190,827	209,200,000	0	0	0	0	0	0	72,508,390,827
3	2358 Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	0 0.00%	60,870,745,000 1,846,434,700 (3.03%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	60,870,745,000 1,846,434,700 (3.03%)
		SISA	0	59,024,310,300	0	0	0	0	0	0	0	59,024,310,300
4	2360 Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	0 0.00%	24,000,000,000 1,344,429,642 (5.60%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	24,000,000,000 1,344,429,642 (5.60%)
		SISA	0	22,655,570,358	0	0	0	0	0	0	0	22,655,570,358
5	2361 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	60,500,000,000 9,691,094,342 (16.02%)	73,138,200,000 8,464,802,637 (11.57%)	4,441,800,000 817,000,000 (18.39%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	138,080,000,000 18,972,896,979 (13.74%)
		SISA	50,808,905,658	64,673,397,363	3,624,800,000	0	0	0	0	0	0	119,107,103,021
6	5279 Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	0 0.00%	7,867,720,000 1,681,976,750 (21.38%)	457,280,000 52,500,000 (11.48%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	8,325,000,000 1,734,476,750 (20.83%)
		SISA	0	6,185,743,250	404,780,000	0	0	0	0	0	0	6,590,523,250
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	60,500,000,000 9,691,094,342 (16.02%)	321,328,130,000 21,978,868,782 (6.84%)	6,671,870,000 989,868,400 (14.84%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	388,500,000,000 32,659,831,524 (8.41%)
		SISA	50,808,905,658	299,349,261,218	5,682,001,600	0	0	0	0	0	0	355,840,168,476



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	019024 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	PAGU REALISASI	0 0.00%	616,630,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	616,630,000 (0.00%)
		SISA	0	616,630,000	0	0	0	0	0	0	0	616,630,000
2	029091 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,044,520,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,044,520,000 (0.00%)
		SISA	0	1,044,520,000	0	0	0	0	0	0	0	1,044,520,000
3	039018 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,211,180,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,211,180,000 (0.00%)
		SISA	0	1,211,180,000	0	0	0	0	0	0	0	1,211,180,000
4	049034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	PAGU REALISASI	0 0.00%	486,850,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	486,850,000 (0.00%)
		SISA	0	486,850,000	0	0	0	0	0	0	0	486,850,000
5	059033 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,402,520,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,402,520,000 (0.00%)
		SISA	0	1,402,520,000	0	0	0	0	0	0	0	1,402,520,000
6	069023 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	PAGU REALISASI	0 0.00%	844,900,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	844,900,000 (0.00%)
		SISA	0	844,900,000	0	0	0	0	0	0	0	844,900,000
7	079034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	PAGU REALISASI	0 0.00%	881,100,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	881,100,000 (0.00%)
		SISA	0	881,100,000	0	0	0	0	0	0	0	881,100,000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)

8	089005 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	PAGU REALISASI	0	752,285,000	0	0	0	0	0	0	0	752,285,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	752,285,000	0	0	0	0	0	0	0	752,285,000
9	099040 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	PAGU REALISASI	0	661,605,000	0	0	0	0	0	0	0	661,605,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	661,605,000	0	0	0	0	0	0	0	661,605,000
10	109036 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	PAGU REALISASI	0	650,525,000	0	0	0	0	0	0	0	650,525,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	650,525,000	0	0	0	0	0	0	0	650,525,000
11	119039 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	PAGU REALISASI	0	718,540,000	0	0	0	0	0	0	0	718,540,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	718,540,000	0	0	0	0	0	0	0	718,540,000
12	129035 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	PAGU REALISASI	0	653,900,000	0	0	0	0	0	0	0	653,900,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	653,900,000	0	0	0	0	0	0	0	653,900,000
13	139036 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PAGU REALISASI	0	666,720,000	0	0	0	0	0	0	0	666,720,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	666,720,000	0	0	0	0	0	0	0	666,720,000
14	149031 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PAGU REALISASI	0	668,480,000	0	0	0	0	0	0	0	668,480,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	668,480,000	0	0	0	0	0	0	0	668,480,000
15	159038 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PAGU REALISASI	0	683,140,000	0	0	0	0	0	0	0	683,140,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	683,140,000	0	0	0	0	0	0	0	683,140,000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)

16	169035 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PAGU REALISASI	0	634,500,000	0	0	0	0	0	0	0	634,500,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	634,500,000	0	0	0	0	0	0	0	634,500,000
17	179056 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	PAGU REALISASI	0	789,800,000	0	0	0	0	0	0	0	789,800,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	789,800,000	0	0	0	0	0	0	0	789,800,000
18	189037 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	PAGU REALISASI	0	643,960,000	0	0	0	0	0	0	0	643,960,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	643,960,000	0	0	0	0	0	0	0	643,960,000
19	199036 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PAGU REALISASI	0	1,102,570,000	0	0	0	0	0	0	0	1,102,570,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	1,102,570,000	0	0	0	0	0	0	0	1,102,570,000
20	209034 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PAGU REALISASI	0	866,680,000	0	0	0	0	0	0	0	866,680,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	866,680,000	0	0	0	0	0	0	0	866,680,000
21	219031 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	PAGU REALISASI	0	794,020,000	0	0	0	0	0	0	0	794,020,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	794,020,000	0	0	0	0	0	0	0	794,020,000
22	229056 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	PAGU REALISASI	0	663,790,000	0	0	0	0	0	0	0	663,790,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	663,790,000	0	0	0	0	0	0	0	663,790,000
23	239068 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	PAGU REALISASI	0	776,420,000	0	0	0	0	0	0	0	776,420,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	776,420,000	0	0	0	0	0	0	0	776,420,000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)

24	249087 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	PAGU REALISASI	0	904,070,000	0	0	0	0	0	0	0	904,070,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	904,070,000	0	0	0	0	0	0	0	904,070,000
25	259039 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	PAGU REALISASI	0	928,325,000	0	0	0	0	0	0	0	928,325,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	928,325,000	0	0	0	0	0	0	0	928,325,000
26	269034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	PAGU REALISASI	0	577,600,000	0	0	0	0	0	0	0	577,600,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	577,600,000	0	0	0	0	0	0	0	577,600,000
27	289029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	PAGU REALISASI	0	722,300,000	0	0	0	0	0	0	0	722,300,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	722,300,000	0	0	0	0	0	0	0	722,300,000
28	299037 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	PAGU REALISASI	0	624,110,000	0	0	0	0	0	0	0	624,110,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	624,110,000	0	0	0	0	0	0	0	624,110,000
29	309040 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PAGU REALISASI	0	586,260,000	0	0	0	0	0	0	0	586,260,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	586,260,000	0	0	0	0	0	0	0	586,260,000
30	319034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	PAGU REALISASI	0	574,440,000	0	0	0	0	0	0	0	574,440,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	574,440,000	0	0	0	0	0	0	0	574,440,000
31	329012 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PAGU REALISASI	0	609,460,000	0	0	0	0	0	0	0	609,460,000
			0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	609,460,000	0	0	0	0	0	0	0	609,460,000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)

32	330092 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	PAGU REALISASI	0 0.00%	765,192,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	765,192,000 (0.00%)
		SISA	0	765,192,000	0	0	0	0	0	0	0	765,192,000
33	340065 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	PAGU REALISASI	0 0.00%	545,420,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	545,420,000 (0.00%)
		SISA	0	545,420,000	0	0	0	0	0	0	0	545,420,000
34	417746 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA	PAGU REALISASI	0 0.00%	571,400,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	571,400,000 (0.00%)
		SISA	0	571,400,000	0	0	0	0	0	0	0	571,400,000
35	427686 BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	PAGU REALISASI	16,439,423,000 2,387,487,089 (14.52%)	18,023,406,000 3,157,837,927 (17.52%)	1,507,280,000 52,500,000 (3.48%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	35,970,109,000 5,597,825,016 (15.56%)
		SISA	14,051,935,911	14,865,568,073	1,454,780,000	0	0	0	0	0	0	30,372,283,984
36	622131 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAGU REALISASI	44,060,577,000 7,303,607,253 (16.58%)	277,681,512,000 18,821,030,855 (6.78%)	5,164,590,000 937,368,400 (18.15%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	326,906,679,000 27,062,006,508 (8.28%)
		SISA	36,756,969,747	258,860,481,145	4,227,221,600	0	0	0	0	0	0	299,844,672,492
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	60,500,000,000 9,691,094,342 (16.02%)	321,328,130,000 21,978,868,782 (6.84%)	6,671,870,000 989,868,400 (14.84%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	388,500,000,000 32,659,831,524 (8.41%)
		SISA	50,808,905,658	299,349,261,218	5,682,001,600	0	0	0	0	0	0	355,840,168,476



Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat
Kementerian Kelautan dan Perikanan